

**ANALISIS POTENSI WILAYAH BERBASIS SEKTOR
PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN
PRODUKTIFITAS PERTANIAN KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**SIGID WILYA WIRATMAJA
NIM. 125030600111007**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG
2018**

**ANALISIS POTENSI WILAYAH BERBASIS SEKTOR
PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN
PRODUKTIFITAS PERTANIAN KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**SIGID WILYA WIRATMAJA
NIM. 125030600111007**



**Dosen Pembimbing :
Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG
2018**

MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ
فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ, وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

*“Barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia
wajiblah ia berilmu, Barang siapa menginginkan (selamat dan bahagia)
di akhirat wajiblah ia berilmu pula, Dan barang siapa menginginkan
kedua-duanya wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya”*

(HR. Bukhari dan Muslim)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Saya Persembahkan karyaku ini kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Adikku Tersayang Putri Fidyah Handayani,

seluruh Keluarga Besar Slamet Family

dan seluruh sahabat di Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Potensi Wilayah Berbasis Sektor Pertanian
Dalam Meningkatkan Produktifitas Pertanian Kabupaten
Pati

Disusun oleh : Sigid Wilya Wiratmaja

NIM : 125030600111007

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Minat : Perencanaan Pembangunan

Malang, 21 Desember 2017

Komis Pembimbing

Imam Hanafi, Dr. M.Si, MS
NIP. 1961002 199802 2 001

* laporan ini dibuat 2 lembar :
1. Program Studi
Mahasiswa



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Januari 2018
Jam : 09.00 – 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Sigid Wilya Wiratmaja
Judul : Analisis Potensi Wilayah Berbasis Sektor Pertanian Dalam
Meningkatkan Produktifitas Pertanian Kabupaten Pati

dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Intam Hanafi, M.Si, MS
NIP. 1961002 199802 2 001

Penguji I

Dr. Mochammad Rozikin, M.AP
NIP. 1963053 198802 1 001

Penguji II

Anita Tri Widayawati, S.S, MA
NIP. 201304860322 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 15 Desember 2017



Sigid Wilya Wiratmaja
Sigid Wilya Wiratmaja
NIM. 125030600111007

RINGKASAN

Sigid Wilya Wiratmaja, 2018, **Analisis Potensi Wilayah Berbasis Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Produktifitas Pertanian Kabupaten Pati**. Minat Perencanaan Pembangunan, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS.

Pertanian merupakan salah satu penyokong terbesar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi masyarakat. Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan 1.022.570 Ha sebagai program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang bertujuan untuk menyuplai hasil pertanian ke wilayah lain. Kabupaten Pati sebagai salah satu Kabupaten yang ikut berkontribusi dalam pertanian Jawa Tengah turut berpartisipasi memegang posisi ketiga kontribusi pertanian terbesar. Namun kurangnya informasi dan komunikasi menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengembangkan komoditas unggulan sektor pertanian. Hal ini yang menyebabkan PDRB sektor pertanian Kabupaten Pati tidak bisa tumbuh efektif dan cenderung fluktuatif.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Pengumpulan data menggunakan Teknik dokumentasi. Data yang digunakan adalah PDRB Atas dasar Harga Konstan tahun 2012-2016. Analisis data menggunakan *location question*, *shift share* dan tipologi sektoral.

Hasil Perhitungan *location question*, *shift share* dan tipologi sektoral menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor basis di Kabupaten Pati. Sementara sub sektor yang memiliki nilai kompetitif adalah sub sektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian. Sub sektor terbaik didapat oleh sub sektor perikanan dengan predikat tipologi sektoral sebagai sub sektor yang istimewa. Peranan sub sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Pati sebesar 83,51%.

Hasil dari penelitian ini adalah sektor pertanian sebagai sektor basis di Kabupaten Pati, sub sektor terbaik dan potensial adalah sub sektor perikanan, serta sub sektor pertanian dengan peranan terhadap PDRB sebesar 83,51%. Dengan hal ini pemerintah bisa harus mengembangkan sub sektor pertanian dan perikanan sebagai sub sektor potensial di Kabupaten Pati

Kata Kunci: Potensi Wilayah, Analisis Sektoral , Produktifitas Pertanian

SUMMARY

Sigid Wilya Wiratmaja, 2018. **Analysis of Potential Areas Based Agricultural Sector In Improving Agricultural Productivity Pati Regency.** Interest in Development Planning, Department of Public Administration. University of Brawijaya. Lecturer Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS.

Agriculture is one of the greatest advocates of economic growth and economic development of society. Central Java Province allocates 1,022,570 Ha as a program of sustainable agriculture land protection that aims to supply agricultural products to other regions. Pati regency as one of the contributing districts in Central Java agriculture participated in holding the third position of the largest agricultural contribution. But the lack of information and communication leads to a lack of public knowledge in developing leading commodities in the agricultural sector. This causes the GDP of the agricultural sector Pati regency does can't grow effectively and tend to fluctuate.

Research Methods used in the preparation of this thesis is a type of descriptive research with quantitative approach. The data source used is secondary data source. Data collection using Documentation Technique. The data used is PDRB on the basis of Constant Price of 2012-2016. Data analysis uses location question, shift share and sectoral typology.

Results Calculation of location question, shift share and sectoral typology indicate that agriculture sector is the base sector in Pati Regency. The competing sub-sectors are agriculture, livestock, hunting, and agricultural services sub-sectors. The best sub-sector is obtained by fishery sub sector with sectoral typology as a special sub-sector. The role of agricultural sub-sector to PDRB of Pati Regency is 83,51%.

The result of this research is agriculture sector as base sector in Pati Regency, best and potential sub sector is fishery sub sector, and agriculture sub sector with role to PDRB equal to 83,51%. With this the government could have to develop agriculture and fishery sub-sector as potential sub-sector in Pati Regency.

Keywords: Regional Potential, Sectoral Analysis, Agricultural Productivity

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Sektor Pertanian dalam Pembangunan Wilayah di Kabupaten Pati. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Andy Fefta Wijaya MDA, PhD, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. Hermawan, S.IP, M.Si, selaku Ketua Minat Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS selaku Komisi Pembimbing
5. Bapak dan Ibu dosen Minat Perencanaan Pembangunan Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala Bappeda Kabupaten Pati Bapak Edi Suwanto, Kepala Badan Pusat Statistik Ir. Sri Diastuti, MM, yang telah membantu dalam kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
7. Semua Sahabat-sahabatku yang telah membantu memberikan saran, masukan dan kritikan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi khususnya Perencanaan Pembangunan angkatan 2012 yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan studinya.
9. Bagi semua pihak yang telah membatu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 15 Januari 2018

Penulis
Sigid Wilya Wiratmaja

DAFTAR ISI

COVER	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR GRAFIK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Administrasi Pembangunan	11
B. Perencanaan Pembangunan.....	13
1. Definisi Perencanaan.....	13
2. Definisi Pembangunan	14
3. Tujuan Perencanaan Pembangunan.....	18
4. Unsur-Unsur Perencanaan Pembangunan	18
5. Fungsi Perencanaan Pembangunan	19
6. Perlunya Perencanaan di Negara Berkembang	20
C. Paradigma Pembangunan	22
D. Potensi Wilayah	26
1. Definisi Potensi Wilayah	26
2. Klasifikasi Wilayah.....	29
3. Potensi Wilayah di Indonesia.....	30
4. Permasalahan Wilayah di Indonesia	36

E. Pembangunan Pertanian	38
1. Definisi Pertanian.....	38
2. Konsep Pembangunan Pertanian.....	39
3. Model Pembangunan Pertanian.....	41
4. Tujuan Pembangunan Pertanian.....	44
5. Produktifitas Pertanian.....	44
F. Pembangunan Ekonomi Daerah.....	46
1. Definisi Pembangunan Ekonomi daerah.....	46
2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah.....	47
3. <i>Local Economic Resources Development (LERD)</i>	50
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	51
5. <i>Location Question (LQ)</i>	52
6. <i>Shift Share</i>	54
7. Tipologi Sektoral.....	56
G. Penelitian Terdahulu	58
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Jenis Penelitian.....	60
B. Fokus Penelitian.....	61
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	62
D. Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	62
E. Teknik Analisis Data.....	64
F. Variable dan Pengukuran.....	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	69
A. Gambaran Umum Kabupaten Pati	69
1. Kondisi Geografis Kabupaten Pati.....	69
2. Kondisi Demografis Kabupaten Pati.....	73
B. Penyajian Data	78
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	78
a. Definisi PDRB	79
b. Fungsi PDRB	79
c. Ruang Lingkup PDRB	80
2. Kondisi Perekonomian Kabupaten Pati	87
C. Analisis Data.....	92
1. Analisis <i>Location Question</i>	92
2. Analisis <i>Shift Share</i>	95
a. <i>National Share</i>	96
b. <i>Industrial Mix</i>	97
c. <i>Competitif Position</i>	98

3. Analisis Tipologi Sektoral	101
a. Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian.....	105
b. Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu	106
c. Sub Sektor Perikanan	107
4. Peranan Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Produktifitas Pertanian Kabupaten Pati	108
a. Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian.....	112
b. Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu	114
c. Sub Sektor Perikanan	115
 BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
 DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Perkembangan Produktifitas Padi dan Palawija Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.....	4
2.	Laju Pertumbuhan 5 Kabupaten dengan Kontribusi Terbesar di Jawa Tengah Tahun 2012-2016.....	5
3.	PDRB ADHK Kabupaten Pati Tahun 2012-2016.....	6
4.	Tipologi Sektoral.....	58
5.	Penelitian Terdahulu	59
6.	Variabel Indikator dan Pengukuran	67
7.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pati menurut Kecamatan Tahun 2014-2015	75
8.	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Pati menurut Kelompok Umur Tahun 2013-2015	77
9.	PDRB ADHK Kabupaten Pati Tahun 2012-2016.....	88
10.	PDRB ADHK Provinsi Jawa Tengah	90
11.	Nilai LQ Tahun 2012-2016.....	92
12.	Nilai LQ Sub Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Pati tahun 2012-2016.....	94
13.	Hasil Perhitungan Shift Share Tahun 2012-2016	95
14.	Hasil Perhitungan Shift Share Sub Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan Tahun 2012-2016.....	100
15.	Analisis Tipologi Sektoral	102
16.	Analisis Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan.....	103
17.	Analisis Tipologi Sektoral Sub Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan	104
18.	Analisis Sub Sektor Pertanian Peternakan Perburuan dan Jasa Pertanian.....	105
19.	Analisis Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu.....	106
20.	Analisis Sub Sektor Perikanan	107
21.	Nilai LQ 2012-2016.....	108
22.	Penggunaan lahan di Kabupaten Pati.....	110
23.	Peranan lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan 2012-2016 (%).....	111
24.	Analisis Tipologi Sektoral Sub Sektor Pertanian Peternakan Perburuan dan Jasa Pertanian.....	112
25.	Tabel PDRB ADHK Sub Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan	113
26.	Analisis Tipologi Sektoral Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu.....	113

27. PDRB ADHK Sub Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan.....	114
28. Analisis Sub Sektor Perikanan	115
29. PDRB ADHK Sub Sektor Kehutanan dan Perikanan 2012-2016.....	115

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Peta Administratif Kabupaten Pati.....	70

DAFTAR GRAFIK

No	Judul	Halaman
1.	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pati 2011-2015	74
2.	Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Pati 2015	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kondisi alam tersebut memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian maupun yang berkaitan dengan dengan pertanian. Menurut Soekartawi (2010) melalui gerakan revolusi hijau pada tahun 1984, Indonesia telah mampu mencapai swasembada pangan. Gerakan revolusi hijau bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan melalui usaha pengembangan teknologi pertanian. Penerapan program Revolusi Hijau di Indonesia melalui Program Panca Usaha Pertanian (PUP) yang meliputi pendirian beberapa pabrik pupuk kimia, memproduksi alat pengolahan pertanian, serta pendirian industri pestisida.

Negara dengan basis perekonomian agraris, tidak mungkin melepaskan pembangunan pertanian dalam seluruh kebijakan pembangunan nasional, bahkan merupakan kewajiban menjadikan pembangunan pertanian sebagai prioritas. Menurut Hanani AR (2003) menyatakan bahwa Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional dengan alasan sebagai berikut:

1. Potensi sumber daya besar dan beragam
2. Pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar
3. Besarnya pangsa terhadap ekspor nasional
4. Besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian
5. Peranannya dalam menyediakan pangan masyarakat
6. Menjadi basis pertumbuhan di pedesaan

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Siagian, 2012). Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, bahwa pembangunan yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh negara berkembang dan bangsa Indonesia demi mewujudkan kestabilan ekonomi, politik dan kehidupan sosial masyarakat untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pembangunan pada intinya merupakan suatu proses untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih baik.

Usaha pembangunan nasional melalui pembangunan pertanian tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak, harus dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah/kota, serta masyarakat sebagai petani. Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah yaitu melalui peraturan perundang-undangan (Kuncoro, 2011). Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Berkaitan dengan wewenang dalam konteks otonomi daerah, maka daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah juga mendorong adanya kerjasama antar satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan adanya otonomi daerah akan mempermudah daerah dalam melakukan pembangunan khususnya pembangunan sektor pertanian.

Salah satu penyumbang PDB pertanian terbesar di Indonesia adalah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah tahun 2013-2018, pengembangan kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah seluas ± 990.652 Ha dan kawasan pertanian lahan kering seluas ± 955.587 Ha yang diarahkan di semua kabupaten/kota seJawa Tengah. Lahan pertanian basah dan kering tersebut dikelola untuk mendukung program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Jawa Tengah dengan rencana seluas 1.022.570 Ha. Hasil pertanian pangan antara lain berupa padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Adapun perkembangan produktifitas pertanian tanaman pangan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Perkembangan Produktifitas Padi dan Palawija Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016

No	Komoditas	Produktivitas (kw/ha)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Padi	55,65	56,13	54,47	57,70	56,06
2	Jagung	46,21	48,41	53,30	54,97	55,09
3	Kedelai	15,91	16,48	13,69	15,69	15,21
4	Kacang Tanah	13,08	13,48	12,92	13,60	21,11
5	Kacang Hijau	11,16	11,81	11,75	11,72	11,72
6	Ubi Kayu	193,00	206,10	202,17	217,61	252,79
7	Ubi Jalar	102,00	172,91	196,34	208,72	183,49

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2017

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa produktifitas pertanian komoditas padi, jagung, kedelai kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya. Komoditas yang

memiliki produktifitas paling besar adalah ubi kayu, ubi jalar pada peringkat kedua, serta padi pada peringkat ketiga. Perkembangan produktifitas padi tahun 2009-2013 fluktuatif atau mengalami peningkatan serta penurunan. Diketahui bahwa padi merupakan sumber makanan sehari-hari masyarakat. Maka perlu adanya perhatian lebih besar pada komoditas padi di Jawa Tengah guna menopang kebutuhan pangan di Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 Kabupaten yang seluruhnya ikut andil dalam menopang kebutuhan pangan Jawa Tengah. Adapun laju pertumbuhan 5 kabupaten dengan kontribusi terbesar di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Laju Pertumbuhan 5 Kabupaten dengan Kontribusi terbesar di Jawa Tengah Tahun 2012-2016

No	Kabupaten/kota	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1	Cilacap	2,7	2,9	3,6	4,2	3,6	3,4
2	Brebes	4,1	3,0	2,5	3,1	3,7	3,28
3	Pati	2,7	4,2	4,4	3,8	4,0	3,82
4	Grobogan	4,4	3,6	5,7	4,9	3,8	4,48
5	Demak	3,6	2,8	4,1	2,7	2,7	3,48

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2017

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa lima kabupaten dengan kontribusi pertanian terbesar di Jawa Tengah tahun 2012-2016 adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Demak. Kelima Kabupaten di atas adalah kabupaten yang memiliki potensi pertanian yang layak untuk dikembangkan, salah satunya adalah

Kabupaten Pati yang memiliki rata-rata pertumbuhan 3,82% tahun 2012-2016.

Melihat potensi pertanian Kabupaten Pati secara khusus, adapun kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

**Tabel 3. PDRB Kabupaten Pati Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)**

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.678.000	5.902.448	5.833.742	6.281.187	6.531.664
2	Pertambangan dan Penggalian	378.085	405.306	430.795	441.033	461.019
3	Industri Pengolahan	5.520.584	5.984.883	6.380.180	6.680.746	6.991.047
4	Pengadaan Listrik dan Gas	22.161	24.153	26.456	27.326	28.667
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Limbah	14.859	14.641	15.356	15.627	16.227
6	Konstruksi	1.647.919	1.739.010	1.813.757	1.908.072	2.012.253
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	3.178.820	3.287.462	3.500.934	3.658.738	3.843.147
8	Transportasi dan Pergudangan	586.053	642.674	706.541	761.832	816.952
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	719.005	760.935	817.587	879.849	952.046
10	Informasi dan Komunikasi	445.748	486.915	583.470	640.887	702.540
11	Jas Keuangan dan Asuransi	521.219	546.758	566.832	601.845	644.145
12	Real Estate	227.767	242.821	258.938	276.716	295.118
13	Jasa Perusahaan	40.583	45.427	49.160	53.248	58.312
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	785.387	805.316	817.152	858.767	895.351

15	Jasa Pendidikan	751.901	825.903	913.564	983.636	1.054.753
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177.504	190.039	210.411	226.276	246.572
17	Jasa Lainnya	376.733	404.865	440.338	456.541	490.143
Total PDRB		21.072.329	22.329.694	23.365.214	24.752.325	26.039.955

Sumber: Kabupaten Pati Dalam Angka 2017

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa, sektor pertanian memiliki nilai PDRB terbesar di atas sektor-sektor lainnya. PDRB Sektor Pertanian tahun 2012 adalah 5.678.000 (juta rupiah) kemudian meningkat pada tahun 2013 menjadi 5.902.448 (juta rupiah). Pada tahun 2014, PDRB sektor pertanian mengalami penurunan menjadi 5.833.742 (juta rupiah). Pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 6.281.187 (juta rupiah) dan tahun 2016 sebesar 6.531.664 (juta rupiah).

Penurunan PDRB sektor pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti banjir, kekeringan, kurangnya saluran irigasi, kurangnya akses informasi dan kurangnya penerapan teknologi pertanian. Penelitian atau kajian tentang pertanian di Kabupaten Pati sangat minim, hal inilah yang menyebabkan belum tersedianya informasi konkrit yang menyatakan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Pati merupakan sektor basis dan potensial untuk dikembangkan. Dengan PDRB sektor pertanian yang masih fluktuatif, maka perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Pati mengingat PDRB sektor pertanian adalah yang paling besar. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS POTENSI WILAYAH BERBASIS**

SEKTOR PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN KABUPATEN PATI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sektor pertanian menjadi sektor basis di Kabupaten Pati ?
2. Bagaimanakah peran sektor pertanian dalam meningkatkan produktifitas pertanian Kabupaten Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan sektor pertanian Kabupaten Pati
2. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan peran sektor pertanian dalam meningkatkan produktifitas pertanian Kabupaten Pati

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang analisis sektoral dan pembangunan wilayah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang sejenis
 - c. Memperkaya kajian keilmuan administrasi publik
2. Kontribusi Praktis
- a. Tersedianya informasi mengenai potensi (sektor basis) di Kabupaten Pati.
 - b. Sebagai dasar penentuan arah kebijakan pemerintah daerah dalam menghadapi era otonomi daerah di Kabupaten Pati
 - c. Sebagai bahan rekomendasi dan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk penetapan kebijakan yang akan datang yang berkaitan dengan peningkatan produktifitas pertanian di Kabupaten Pati

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini berdasarkan buku pedoman penyusunan proposal, terbagi menjadi tiga bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang pemilihan judul dan permasalahan yang berkaitan dengan judul, perumusan masalah berupa kajian permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian yang berisikan hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, kontribusi penelitian yang terdiri dari kontribusi akademis dan praktis, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab dalam penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini menguraikan dan menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian yang terdiri dari Administrasi Pembangunan, Perencanaan Pembangunan, Pembangunan Pertanian, Model Pembangunan Pertanian dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian meliputi : jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan data-data temuan di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus peneliti. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan merupakan perkembangan dari disiplin ilmu sebelumnya yaitu Administrasi Publik. Administrasi pembangunan mencakup dua makna, yaitu pertama tentang Administrasi dan yang kedua tentang Pembangunan. Administrasi adalah “keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” (Siagian, 1988). Sedangkan pembangunan memiliki makna sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara sadar dan terencana yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 1988).

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka kesimpulan menurut Siagian (1988) administrasi pembangunan adalah “seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya”. Sedangkan menurut Riggs (1986) administrasi pembangunan “merujuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk

melaksanakan program-program atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan”.

Ruang lingkup administrasi pembangunan sebagai bagian dari disiplin ilmu Administrasi Publik memiliki dua ruang lingkup utama menurut Tjokroamidjojo (1995) antara lain :

1. Penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara. Dalam hal ini usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian, tata kerja dan pengelolaan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut sebagai Pembangunan Administrasi (the development of administration).
2. Merumuskan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan (pada berbagai bidang) serta pelaksanaannya secara efektif. Hal ini disebut juga sebagai Administrasi Pembangunan (the administration of development)

Kedua ruang lingkup Administrasi Pembangunan diatas masih memerlukan dukungan atau partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu Tjokroamidjojo (1983) menyatakan satu ruang lingkup yaitu pembangunan partisipasi masyarakat sebagai ruang lingkup yang ketiga. Dari berbagai hasil studi dan atau penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran sangat penting dalam pembangunan. Tujuan pembangunan tidak akan pernah tercapai jika meninggalkan peran serta masyarakat ini. Menurut Tjokroamidjojo (1995) terdapat empat aspek penting partisipasi dalam rangka pembangunan, yaitu :

1. Terlibatnya dan ikut sertanya masyarakat sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu Negara turut menentukan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya.

3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam perencanaan pembangunan.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah proses pengendalian usaha oleh suatu bangsa dan negara dalam mewujudkan pertumbuhan berbagai macam aspek kehidupan yang dilakukan secara sadar dan terencana menuju kearah yang dianggap lebih baik.

B. Perencanaan Pembangunan

1. Definisi Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi seperti peristiwa, keadaan, suasana dan sebagainya (Siagian dalam Susetyo 2010). Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal yang akan dikerjakan dimasa datang. Menurut Tjokroamidjojo (1984) perencanaan didefinisikan sebagai berikut.

“Suatu proses menyiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan penggunaan sumberdaya (termasuk sumberdaya ekonomi) yang terbatas adanya untuk mencapai suatu tujuan-tujuan keadaan social ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.”

Adapula unsur-unsur dari perencanaan yang baik menurut Riyadi dalam Susetyo (2010) adalah:

- a. Adanya alternatif-alternatif atau pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa dalam menyusun

rencana perlu memperhatikan berbagai alternative pilihan sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

- b. Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta. Ini berarti bahwa perencanaan hendaknya berdasarkan asumsi yang didukung dengan fakta atau bukti yang ada. Hal ini menjadi penting karena hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan atau aktifitas.
- c. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perencanaan merupakan suatu alat atau sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan.
- d. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan.
- e. Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

Melihat beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan serangkaian kegiatan menetapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang berdasarkan asumsi-asumsi yang matang dan fakta-fakta yang terbukti akan kebenarannya dalam rangka pencapaian tujuan. Perencanaan merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan kegiatan, agar kegiatan yang ada dapat dikerjakan sesuai dengan ekspektasi dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Definisi Pembangunan

Pembangunan berasal dari kata “bangun” yang memiliki arti sadar, siuman, bangkit, berdiri, dan juga berarti bentuk (Suryono, 2010). Dalam kata kerja, “bangun” juga memiliki arti membuat, mendirikan, atau membina. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan bentuk (anatomik), kehidupan (fisiologis), dan perilaku (behavioral). Secara ensiklopedik, kata pembangunan telah menjadi bahasa dan konsep dunia. Konsep tersebut dianalogkan dengan konsep: pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*),

westernisasi (*westernization*), perubahan social (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaruan (*innovation*), pembangunan bangsa (*nation building*), pengembangan (*progress/developing*), dan pembinaan (*construction*) (Suryono, 2004).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan tidak hanya menyangkut perubahan fisik dan konkret, namun juga perubahan manusia kearah yang lebih baik, sehingga masyarakat mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk memilih dan menanggapi setiap perubahan sosial yang terjadi. Briyant dan White juga mengemukakan lima implikasi utama yang perlu diperhatikan dalam pembangunan, yaitu antara lain :

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
- b. Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, pemerataan nilai, dan kesejahteraan (*equity*).
- c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
- d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
- e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu terhadap negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (*interdependence*).

Sedangkan menurut Siagian (1988) pembangunan didefinisikan sebagai “rangkaian suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Dari definisi tersebut maka munculah tujuh ide pokok, yaitu :

- a. Pembangunan merupakan suatu proses.
- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
- c. Pembangunan dilaksanakan secara terencana, baik dalam jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang.
- d. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
- e. Pembangunan mengarah kepada modernitas.
- f. Modernitas pembangunan ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan bersifat multidimensial.
- g. Pembangunan ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga suatu bangsa menjadi kokoh pondasinya.

Hal senada juga disampaikan oleh Tjokrowinoto dalam Suryono (2004) yang menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut:

- a. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- b. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
- c. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).
- d. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep transendental, sebagai *metadisciplinary phenomenon*, bahkan memperoleh bentuk sebagai *ideology, the ideology of developmentalism*.
- e. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*vaule loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara meningkat.
- f. Pembangunan menjadi *culture specific, situation specific* dan *time specific*.

Perencanaan pembangunan tertuang dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam UU tersebut dikatakan bahwa untuk menjadikan pembangunan berjalan efisien, dan efektif maka diperlukan Perencanaan Pembangunan. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu kesatuan dalam

perencanaan nasional yang bertujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan.

Adapun ciri-ciri Perencanaan Pembangunan yang bersifat usaha untuk pencapaian tujuan-tujuan pembangunan menuju yang lebih baik menurut Tjokroamijoyo (1984) sebagai berikut:

- a. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady social economic growth*).
- b. Usaha yang dicerminkan dalam pendapatan perkapita.
- c. Adanya usaha dalam mengadakan perubahan pada struktur ekonomi.
- d. Adanya perluasan kesempatan kerja.
- e. Adanya usaha untuk pemerataan pembangunan (*distributive justice*).
- f. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
- g. Usaha sedemikian rupa supaya kemampuan membangun secara bertahap lebih didasarkan kepada kemampuan nasional.
- h. Terdapatnya usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.
- i. Perubahan structural perlembagaan masyarakat, pola pemilihan dan pengusahaan faktor-faktor produksi.

Dengan melihat kedua pengertian di atas maka dapat kita simpulkan bahwa Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu

3. Tujuan Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan bahwa tujuan perencanaan pembangunan adalah:

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4. Unsur-unsur Perencanaan Pembangunan

Setiap perencanaan pembangunan memiliki unsur-unsur pokok, sebagai berikut:

- a. Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan.
Unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencana, yang kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya.
- b. Adanya kerangka rencana makro. Dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabel-variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut.

- c. Perkiraan sumber-sumber pembangunan khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan yang strategis, sehingga perlu diperkirakan dengan seksama.
- d. Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten seperti misalnya kebijaksanaan fiskal, penganggaran, moneter, harga serta kebijaksanaan sektoral lainnya. Berbagai kebijaksanaan itu perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan.
- e. Perencanaan pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan bersama-sama dengan penyusunan rencana-rencana sasaran.
- f. Perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut.

5. Fungsi Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi-fungsi, sebagai berikut:

- a. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan pembangunan.

- b. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
- c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
- d. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
- e. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi.

6. Perlunya Perencanaan di Negara Berkembang

Perencanaan berkaitan dengan faktor-faktor produksi atau sumber daya alam yang terbatas, untuk dimanfaatkan mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal perencanaan wilayah, Menurut Tarigan (2008) pentingnya perencanaan dikuatkan oleh berbagai faktor sebagai berikut:

- a. Banyak diantara potensi wilayah selain terbatas juga tidak mungkin diperbanyak atau diperbaharui. Jika bisa diperbaharui pun memerlukan waktu yang cukup lama dan biayanya cukup besar. Potensi itu meliputi luas wilayah, sumber air bersih yang tersedia, bahan tambang yang sudah terkuras, luas hutan penyangga yang menciut, luas jalur hijau yang menciut, tanah longsor atau permukaan tanah yang terkena erosi.
- b. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia.
- c. Kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sering tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali.
- d. Lahan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya.
- e. Tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut

- f. Potensi sumber daya alam dan peninggalan manusia jaman dahulu merupakan aset yang harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dalam jangka panjang dan bersifat langgeng.

Sementara itu, menurut Arsyad (2004) Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya. Oleh karena itu diperlukan perencanaan untuk :

- a. Memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar.
Mekanisme pasar biasanya belum sempurna karena ketidaktahuan dan ketidakbiasaan negara sedang berkembang dengan mekanisme seperti itu sehingga perekonomian didominasi oleh sektor non uang. Pasar produk, faktor produksi, modal dan uang tidak teroganisir dengan baik sehingga keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat atas barang dan jasa tidak terjadi.
- b. Mengurangi pengangguran.
Oleh karena langkanya modal dan melimpahnya tenaga kerja, maka masalah penyediaan lapangan kerja menjadi masalah yang sulit dipecahkan. Oleh karena itu perlu adanya badan perencana yang terpusat yang diharapkan dapat mengatasi kesulitan ini.

Menurut Widodo (2006) menyatakan alasan diperlukannya perencanaan dalam proses pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan
Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menyebabkan perubahan yang sangat cepat di dalam masyarakat. Cepatnya perubahan yang dialami masyarakat ini memiliki dampak tersembunyi yang bisa sangat merusak tatanan yang dimiliki masyarakat. Pesatnya perkembangan ini dapat dilihat dari indikator semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di suatu daerah. Dengan kata lain, mobilisasi penduduk dari daerah ke daerah lain menjadi semakin mudah untuk dilakukan. Hal ini dapat berakibat buruk bagi sebuah daerah dimana penduduknya memilih untuk bekerja di daerah lain namun memilih bertempat tinggal di daerah tersebut. Hal ini berarti daerah tersebut tidak akan mengalami perkembangan ekonomi yang berarti dibandingkan dengan daerah dimana para penduduk tersebut bekerja. Potensi kemunduran yang

demikianlah yang patut menjadi perhatian dalam sebuah proses perencanaan.

- b. Perencanaan merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak pembangunan yang akan muncul setelah proses tersebut selesai. Dampak buruk dari sebuah proses pembangunan sering kali menjadi sesuatu hal yang sulit diperbaiki mengingat proses tersebut telah melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Untuk itulah proses perencanaan pembangunan yang tepat diperlukan sehingga dampak negatif dari pembangunan bisa diminimalisir.
- c. Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup pelaksanaannya. Tanpa adanya perencanaan pembangunan yang akurat, pembangunan mungkin dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama meskipun sebenarnya pelaksanaannya dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Selain itu, perencanaan juga dapat berperan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat dimonitor pihak-pihak terkait tidak terkecuali masyarakat luas.

C. Paradigma Pembangunan

Paradigma pembangunan menurut Surjadi (2002) adalah “cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pembangunan dalam arti pembangunan baik sebagai proses maupun sebagai metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat”. Dalam perkembangannya, pembangunan bangsa-bangsa di dunia mengalami pergeseran paradigma pembangunan. Menurut Tjokrowinoto yang dikutip dalam Surjadi (2002) ada tiga paradigma yang dipandang cukup dominan, yaitu antara lain :

1. Paradigma Pertumbuhan (*Growth Paradigm*)

Pelaksanaan pembangunan di negara-negara berkembang (*developing countries*), mengutamakan pada upaya peningkatan

pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional. Penerapan paradigma pertumbuhan dalam pelaksanaan pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pertama berlangsung pada dasawarsa 1960-1970 dengan strategi pertumbuhan ekonomi Negara berkembang sebesar lima persen (5%) pertahun. Pada periode ini mengabaikan masalah distribusi pendapatan nasional, sehingga timbul masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pembagian pendapatan, urbanisasi, dan kerusakan lingkungan. Melihat kenyataan itu terjadilah pergeseran dari strategi pertumbuhan ekonomi menjadi strategi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Selanjutnya timbulah pemikiran paradigma baru yaitu paradigma kesejahteraan (*welfare paradigm*)

2. Paradigma Kesejahteraan (*Welfare Paradigm*)

Pada awal dasawarsa tahun 1970-an muncul pemikiran baru dalam pelaksanaan pembangunan yaitu paradigma kesejahteraan (*welfare paradigm*) yang berorientasi untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pada periode dasawarsa kedua (1970-1980) pelaksanaan pembangunan dengan strategi pertumbuhan ekonomi bergeser kepada orientasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan (*growth and equity of strategy development*) menuju industrialisasi dengan strategi pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen (6%) pertahun dengan tujuan pemerataan pembangunan di bidang pendapatan, kesehatan, keadilan,

pendidikan, kewirausahaan, keamanan, kesejahteraan sosial termasuk pelestarian dan penyelamatan lingkungan dari kerusakan. Dalam rentang dasawarsa ini ternyata juga masih belum mampu merubah ketergantungan oleh negara berkembang terhadap Negara maju yang ditandai dengan ketergantungan investasi, bantuan, dan pinjaman luar negeri.

Penerapan paradigma kesejahteraan ini pelaksanaan pembangunannya cenderung bersifat sentralistik (*top down*) sehingga cenderung menumbuhkan hubungan ketergantungan antara rakyat dan proyek-proyek pembangunan (birokrasi pemerintah) yang dilakukan oleh pemerintah. Pada saat waktunya tiba dapat membahayakan keberlanjutan proyek pembangunan itu, oleh karena pembangunan tersebut sifatnya tidak menumbuhkan pemberdayaan (*disempowering*) rakyat agar mampu menjadi subyek dalam pembangunan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pembangunan dengan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menjadikan paradigma pertumbuhan menjadi semakin dominan. Akan tetapi keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai resiko negatif yang terjadi. Paradigma pertumbuhan ini cenderung menciptakan dampak negatif tertentu yang mengakibatkan penurunan derajat keberlanjutan pembangunan. Selanjutnya munculah gagasan baru dalam strategi pembangunan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan yaitu pembangunan berkelanjutan (*sustained development*).

Strategi pembangunan berkelanjutan (*sustained development*) ini belajar dari pengalaman pelaksanaan pembangunan pada dasawarsa ketiga dengan munculnya konsep tata ekonomi dunia baru sebagai upaya perbaikan sosial ekonomi negara berkembang dengan strategi pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen (7%) pertahun. Pada dasawarsa ini, pusat perhatian proses pembangunan berkaitan dengan masalah kependudukan yang meningkat pesat (*population boom*), urbanisasi, kemiskinan, kebodohan, partisipasi masyarakat, organisasi sosial politik, kerusakan lingkungan, dan masyarakat pedesaan. Dalam dasawarsa ini masih menghadapi masalah, yaitu tentang pelaksanaan pembangunan tidak berpadu pada pembangunan manusia, sehingga pada gilirannya berpengaruh pada timbulnya masalah ketidakadilan, kelangsungan hidup dan ketidakpaduan pembangunan.

3. Paradigma Pembangunan yang Berpusat pada Manusia (*People Centered Development Paradigm*)

Belajar dari pengalaman sebelumnya yaitu pada dasawarsa ketiga pada awal 1980-an di negara berkembang penerapan konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) didukung dengan pendekatan pembangunan manusia (*human development*) yang ditandai dengan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan sosial melalui pemenuhan kebutuhan pokok berupa pelayanan sosial di sektor kesehatan, perbaikan gizi, sanitasi, pendidikan, dan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu

juga diarahkan pada upaya untuk mewujudkan keadilan, pemerataan dan peningkatan budaya, kedamaian serta pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (*public empowerment*) supaya dapat menjadi aktor pada pembangunan sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemandirian, dan etos kerja. Fokus perhatian dari paradigma ini adalah perkembangan manusia (*human-growth*), kesejahteraan (*well-being*), keadilan (*equity*) dan berkelanjutan (*sustainability*). Dominasi pemikiran dalam paradigma yang berpusat pada pembangunan manusia ini adalah keseimbangan ekologi manusia (*balanced human ecology*), sumber pembangunannya yaitu informasi dan prakarsa yang kreatif dengan tujuan utama adalah aktualisasi optimal dari potensi.

D. Potensi Wilayah

1. Definisi Potensi Wilayah

Potensi berarti kemampuan yg mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan dan daya. Berpotensi artinya memiliki potensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kesanggupan, daya, kemampuan untuk lebih berkembang. Setiap orang memiliki potensi, dan tentu berbeda setiap apa yang dimiliki antara satu orang dengan orang lain. Ada dua bentuk potensi yaitu :

a. Potensi Fisik

Kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan apabila dilatih dengan baik. Kemampuan yang terlatih ini akan menjadi suatu kecakapan, keahlian, dan ketrampilan dalam bidang tertentu. Potensi fisik akan semakin berkembang bila secara intens dilatih dan dipelihara. Potensi fisik ini seperti, tubuh, otot, wajah, ketahanan ataupun kesehatan.

b. Potensi Psikis

Bentuk kekuatan diri secara kejiwaan yang dimiliki seseorang dan memungkinkan untuk ditingkatkan dan dikembangkan apabila dipelajari dan dilatih dengan baik. Potensi psikis ini meliputi IQ (*Intelligence Quotient*), EQ (*Emotional Quotient*), AQ (*Addversity Quotient*) dan SQ (*Spiritual Quotient*).

Berdasarkan pengertian diatas, Potensi adalah kadar kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan untuk mencapai hasil yang maksimal.

Sedangkan Wilayah (*region*) oleh Adisasmita (2013) diartikan sebagai “suatu permukaan (daratan atau perairan) dengan batas-batas wilayah tertentu, dimana terjadi interaksi antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya alam, sumberdaya modal, sumberdaya teknologi, dan sumberdayasumberdaya pembangunan lainnya.” Sedangkan pengertian wilayah (Tarigan, 2012) yang digunakan dalam perencanaan dapat berarti

“suatu wilayah yang sangat sempit atau sangat luas, sepanjang di dalamnya terdapat unsur ruang atau space. Untuk keperluan perencanaan maka wilayah harus dapat dibagi (partitioning) atau dikelompokkan (grouping) ke dalam satu kesatuan, tujuannya agar bisa dibedakan dengan kesatuan lain.”

Wilayah (Wibowo dan Soetriono, 2004) juga diartikan sebagai unit geografi yang membentuk suatu kesatuan. Pengertian unit geografi adalah ruang, sehingga bukan merupakan aspek fisik tanah saja, tetapi lebih dari itu meliputi aspek-aspek lain, seperti biologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi wilayah merupakan suatu ruang yang membentuk suatu kesatuan, memiliki batasan dan karakteristik tertentu yang berbeda antara satu dengan lainnya, dimana terjadi interaksi sumberdaya manusia dengan sumberdaya alam, sumberdaya modal, sumberdaya teknologi, dan sumberdayasumberdaya pembangunan lainnya.

Berdasarkan definisi potensi dan definisi wilayah diatas maka dapat ditarik garis besar bahwa potensi wilayah merupakan suatu sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi suatu wilayah tersebut baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sumber daya manusia ialah potensi manusia itu sendiri yang dapat mengolah sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam di permukaan bumi tersebar tidak merata, hal ini menyebabkan ketergantungan antar wilayah sehingga diperlukan kerja sama antar wilayah. Manusia (penduduk) suatu wilayah/negara merupakan sumber daya bagi wilayah/negara tersebut karena manusia dapat memberikan manfaat bagi wilayah/negaranya.

Seperti tenaga kerja, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan ekonomi wilayah/negara (Soegimo, 2009).

2. **Klasifikasi Wilayah**

Okun dan Richardson (dalam Adisasmita, 2013) mengklasifikasikan wilayah menjadi 4 kategori menggunakan 2 indikator yaitu tingkat kemakmuran (kesejahteraan) yang diukur menggunakan pendapatan perkapita dan kemampuan berkembang suatu wilayah yang diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), yaitu sebagai berikut :

- a. Wilayah yang memiliki tingkat pendapatan perkapita tinggi dan tingkat pertumbuhan PDRB pertahun tinggi
- b. Wilayah yang memiliki tingkat pendapatan perkapita tinggi dan tingkat pertumbuhan PDRB pertahun rendah
- c. Wilayah yang memiliki tingkat pendapatan perkapita rendah dan tingkat pertumbuhan PDRB pertahun rendah
- d. Wilayah yang memiliki tingkat pendapatan perkapita rendah dan tingkat pertumbuhan PDRB pertahun rendah

Klasifikasi wilayah lainnya dikemukakan oleh John Friedman dan William Alonso (2013) yang terdiri dari empat macam, yaitu :

- a. Wilayah metropolitan (metropolitan region)
- b. Wilayah poros pembangunan (development axis region)
- c. Wilayah perbatasan (frontier region)
- d. Wilayah stagnan atau tertekan (stagnant region)

3. Potensi Wilayah di Indonesia

Indonesia adalah negara beriklim tropis yang berbentuk kepulauan. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Sumber daya alam biotik maupun sumber daya alam abiotik ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan negara. Diantara potensi sumber daya alam Indonesia yang dapat diperbaharui maupun yang tak terbaharukan adalah hutan, laut, udara, tanah dan hasil tambang Berikut adalah penjelasan masing- masing potensi sumber daya alam Indonesia:

a. Hutan

Hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan terbesar ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Akan tetapi luas hutan tersebut semakin berkurang dari waktu ke waktu. Padahal potensi hutan Indonesia sangat besar. Tidak hanya kayunya saja, namun semua makhluk yang mendiami hutan termasuk dalam potensi sumber daya hutan. Keanekaragaman hayati yang berada di hutan bermanfaat dan berperan penting dalam keseimbangan lingkungan hidup. Hutan bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Beberapa jenis hutan Indonesia adalah

hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Berikut pemanfaatan masing- masing jenis hutan tersebut.

1) Hutan lindung

Jenis hutan ini merupakan kawasan hutan yang berfungsi sebagai pelindung sistem yang menyangga kehidupan. Pemanfaatan hutan lindung adalah sebagai pengatur ketersediaan air, mencegah erosi tanah, mencegah masuknya air laut ke daratan (banjir rob), mencegah terjadinya bencana banjir dan menjaga kelestarian tanah.

2) Hutan produksi

Pemerintah melalui BUMN dan juga pihak swasta mempunyai hak untuk mengelola hutan produksi. Hak itu disebut dengan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Hasil hutan produksi dapat berupa kayu maupun non kayu. Beberapa pohon berkayu seperti pohon jati, akasia, pinus, mahoni dan cendana dimanfaatkan kayunya. Pohon- pohon tersebut ditebang, kayu yang awalnya berbentuk bulat lalu diolah dan dipotong- potong . Sementara hasil hutan non kayu dapat berwujud buah, madu, getah, sutera, sagu dan lain sebagainya.

3) Hutan konservasi

Hutan jenis ini dimanfaatkan sebagai tempat melestarikan keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya.

Contoh dari hutan konservasi adalah cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional (baca : Pengertian Taman Nasional).

b. Laut

Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia diliputi lautan dan samudera. Lautan di wilayah Indonesia kaya akan berbagai jenis ikan yang melimpah. Potensi ikan di laut Indonesia bisa menembus 6 juta ton per tahun. Potensi tersebut menempati urutan keempat pada tahun 2009. Kementrian kelautan dan perikanan sebagai perwakilan negara telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah penangkapan ikan. Ikan- ikan hasil tangkapan kemudian diolah menjadi berbagai produk, salah satunya adalah ikan kaleng. Ini sebagai upaya peningkatkan industri perikanan di Indonesia. Tidak hanya ikan, potensi laut Indonesia juga meliputi keragaman biota yang tinggal di dalamnya. Setidaknya terdapat lebih dari 500 jenis rumput laut dan tak kurang dari 900 jenis terumbu karang yang mempunyai potensi besar untuk kehidupan masyarakat Indonesia.

c. Udara

Udara memang tidak nampak di mata, tidak dapat di bau dan juga tidak berasa. Meski demikian udara yang tidak kasat mata itu bisa dirasakan kehadirannya ketika sedang bergerak. Udara yang

bergerak itulah yang disebut dengan angin. Udara termasuk dalam potensi sumber daya alam karena memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan. Selain digunakan untuk bernapas, udara yang berada di lapisan atmosfer bisa melindungi kita dari sinar ultraviolet serta benda- benda luar angkasa yang akan jatuh ke bumi. Udara tersusun dari 3 unsur yang utama yakni udara kering, uap air dan aerosol.

- 1) Udara kering, ini adalah pembentuk udara yang paling utama. Udara kering memiliki komposisi oksigen, nitrogen dan lain sebagainya. Gas-gas yang berada dalam udara kering itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari.
- 2) Uap air, dihasilkan dari proses penguapan atau evaporasi. Cahaya matahari memanaskan air permukaan seperti sungai dan laut. Air yang dipanaskan akan menguap dan uap air tersebut bergabung dengan udara. Uap air berperan dalam proses pembentukan hujan.
- 3) Aerosol, adalah partikel- partikel berukuran kecil yang melayang di udara. Aerosol dapat berwujud natrium klorida, sulfat, karbon, silikat, kalsium, kalium dan lain sebagainya. Aerosol juga bermanfaat dalam proses kondensasi saat akan terjadi hujan.

d. Tanah

Tanah berasal dari jenis- jenis batuan yang mengalami pelapukan. Semakin banyak batu yang mengalami pelapukan maka semakin tebal tanah yang dihasilkan. Semakin dalam lapisan tanah, maka semakin tua pula umur tanah tersebut. Tanah di Indonesia bisa dikelompokkan menjadi 3 menurut sifat batuan induknya.

- 1) Tanah vulkanik. Tanah ini terbentuk dari material hasil letusan gunung berapi. Tanah vulkanik jelas lebih subur dari jenis tanah lainnya. Tanah yang subur tersebut sangat membantu dalam bidang pertanian. Ini lah sebabnya kaki gunung menjadi daerah yang cocok untuk bertani dan berkebun.
- 2) Tanah non- vulkanik. Nama lain dari jenis tanah ini adalah tanah tersier yang mana tidak terbentuk dari proses vulkanisme (baca : Pengertian Vulkanisme. Tanah non- vulkanik banyak tersebar di daerah Kepulauan Riang, Bangka dan daerah lain di Pulau Sumatera.
- 3) Tanah organik. Sebutan lain dari tanah organik yakni tanah humus atau tanah gambut. Tanah organik berasal dari timbunan sisa- sisa tanaman dan banyak terdapat di rawa-rawa. Tanah organik berwarna hitam dan banyak di jumpai di Merauke dan pesisir Kalimantan.

e. Hasil Tambang

Pertambangan menjadi potensi sumber daya alam yang banyak dicari karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Tiga hasil tambang yang paling populer di Indonesia adalah minyak bumi, gas alam dan batu bara. Ketiganya dijadikan sebagai sumber bahan bakar dalam berbagai bidang.

- 1) Potensi sumber daya tambang yang pertama yakni minyak bumi. Potensi minyak bumi terutama di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Indonesia sudah melakukan impor minyak bumi guna memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Pembangkit listrik di Indonesia masih banyak yang menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar.
- 2) Potensi tambang yang kedua adalah gas alam. Potensi gas alam di Indonesia masih sangat banyak. Cadangan gas alam Indonesia sekitar 2.8 triliun meter kubik. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia.
- 3) Potensi tambang yang ketiga yaitu batu bara. Negara Indonesia berada dalam urutan kelima yang menghasilkan batu bara paling banyak di dunia. Batu bara juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam sektor pembangkit

listrik. Hanya saja penggunaannya masih kalah populer dari minyak bumi.

4. Permasalahan Wilayah di Indonesia

Wilayah Indonesia yang begitu luas serta dikaruniai potensi wilayah yang besar juga memiliki berbagai permasalahan wilayah, antara lain:

a. Pertahanan dan keamanan

Pulau-kecil di perbatasan masih menyisakan permasalahan di bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini disebabkan antara lain oleh belum terselesaikannya permasalahan penetapan sebagian perbatasan maritim dengan negara tetangga. Hal tersebut yang melatar belakangi konflik atas beberapa pulau terluar di wilayah Republik Indonesia. Masalah ketidakjelasan batas negara dan status wilayah adalah sumber sengketa yang potensial terjadi.

Persengketaan ini terjadi karena penerapan prinsip yang berbeda terhadap batas-batas landas kontinen antar negara bertetangga. Perbedaan prinsip muncul akibat banyak motivasi yang meliputi kepentingan hukum, politik, ekonomi, keamanan dan juga kedaulatan. Perkembangan situasi negara, regional dan internasional turut mempengaruhi tingkah laku negara yang bersengketa.

b. Disparitas Perkembangan Sosial Ekonomi

Letak dan posisi geografis pulau-pulau kecil yang sedemikian rupa menyebabkan timbulnya disparitas perkembangan

sosial ekonomi dan persebaran penduduk antara pulau-pulau besar yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

c. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Dasar

Pulau-pulau kecil sulit dijangkau oleh akses perhubungan karena letaknya yang terisolir dan jauh dari pulau induk. Terbatasnya sarana dan prasarana seperti jalan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pasar, listrik, media informasi dan komunikasi menyebabkan tingkat pendidikan (kualitas SDM), tingkat kesehatan, tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat pulau-pulau kecil rendah.

d. Konflik Kepentingan

Ketidakpaduan antar kegiatan menjadi sumber terjadinya konflik penggunaan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Sebagai contoh, antara kegiatan nelayan tradisional dengan nelayan modern, perikanan budidaya dan kegiatan pelayaran. Di samping itu, ketidakpaduan pengelolaan pulau-pulau kecil juga dapat menimbulkan konflik budaya melalui industri wisata yang cenderung bertentangan dengan kebudayaan lokal. Pengelolaan pulau-pulau kecil akan berdampak pada lingkungan, baik positif maupun negatif sehingga harus diupayakan agar dampak negatif dapat diminimalkan dengan mengikuti pedoman-pedoman dan peraturan-peraturan yang dibuat.

E. Pembangunan Pertanian

1. Definisi Pertanian

Potensi sumberdaya alam agraris yang sangat melimpah dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik menjadi sesuatu yang berguna, baik sebagai bahan pangan ataupun untuk dijual sebagai pemasukan bagi masyarakat. Usaha yang berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya alam agraris tersebut dapat disebut sebagai pertanian. Pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas, yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan, petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya (Mosher, 1966). Menurut Husein (2011) ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia memiliki peranan sangat penting yaitu antara lain potensi sumberdaya alam yang mendukung pencapaian swasembada pangan, jumlah sumber daya manusia (SDM) yang bekerja pada sektor pertanian dan nilai ekonomis dari produk pertanian yang masih mampu untuk ditingkatkan.

Definisi pertanian dapat diklasifikasikan menjadi dua pengertian, yakni pengertian pertanian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Menurut pendapat Fatah (2006) pertanian dalam arti sempit adalah suatu usaha di bidang tanaman, sedangkan pertanian dalam arti luas adalah usaha di bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Pertanian terdiri dari beberapa

komponen penyusun yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

Soetriono (2006) mengatakan bahwa

“Secara garis besar, pengertian pertanian dapat diringkas menjadi empat komponen yang tidak terpisahkan, keempat komponen tersebut meliputi : (1) proses produksi, (2) petani atau pengusaha pertanian, (3) tanah tempat usaha, dan (4) usaha pertanian (*farm business*)”.

Keempat komponen tersebut menunjukkan bahwa pertanian merupakan suatu proses yang kompleks lebih dari sekedar usaha di bidang tanaman. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pertanian merupakan segala usaha yang dilakukan manusia dalam mengolah sumberdaya yang meliputi tanaman, ternak, dan perikanan dengan memanfaatkan teknologi, modal, tenaga kerja, alat serta manajemen untuk dikelola lebih lanjut dalam proses produksi menjadi bernilai ekonomis dan berdaya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia maupun menghasilkan pendapatan dari penjualan hasil pertanian tersebut.

2. Konsep Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian merupakan sesuatu yang mendesak bagi suatu negara yang memiliki sumberdaya alam melimpah pada sektor agraris. Bidang pertanian bukan hanya sebagai sektor penunjang dari pembangunan, namun sebagai sektor penting yang harus dikembangkan dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan seringkali diartikan pada perubahan dan pertumbuhan. Menurut Soekartawi (1995) “pembangunan pertanian dapat diartikan jika

terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi sekaligus terjadi perubahan masyarakat tani dari keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik”. Terdapat juga pendapat lain tentang hal ini yang mengatakan bahwa “pembangunan pertanian merupakan pembangunan yang mengintegrasikan pertanian dengan industri dan jasa terkait dalam suatu kluster industri yang mencakup input produksi, usaha tani, pemasaran, dan pengelolaan serta jasa” (Hanani dkk, 2003).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan pertanian adalah pembangunan pada bidang pertanian yang didalamnya terdapat proses-proses yang meliputi produksi, pemasaran, dan pengelolaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani sekaligus meningkatkan perekonomian negara sebagai tujuan dari pembangunan nasional. Menurut Arsyad (2004) peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting, sehingga pembuat kebijakan harus menaruh perhatian dalam pengembangan sektor pertanian yang bisa ditempuh dengan cara menjaga stabilitas harga jual pertanian. Hal senada tentang pentingnya pengembangan pertanian juga dikatakan oleh Fatah (2006) yang menyatakan bahwa hakikat pembangunan pertanian yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yaitu suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup petani yang dilakukan dengan cara pengembangan kemampuan (*skill*) dan pengetahuan petani, mempermudah petani dalam memperoleh modal dan

sarana prasarana pertanian, serta merubah cara dan teknologi bertani ke arah yang lebih baik.

Pembangunan pertanian dapat dikatakan sebagai pembangunan ekonomi di sektor pertanian, namun tujuan yang ingin dicapai tidak hanya di ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh Yuwono (2011) yang mengatakan bahwa “Meskipun pembangunan pertanian dapat dipandang sebagai pembangunan ekonomi di sektor pertanian, tetapi ada yang mengemukakan bahwa pembangunan pertanian tidak hanya dapat dipandang dari segi ekonomi saja, karena pembangunan pertanian juga meliputi aspek sosial kelembagaan, teknologi dan mungkin masih banyak aspek-aspek lainnya”. Pembangunan pertanian juga berkepentingan pada perubahan pertanian dalam hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat petani maupun masyarakat pada umumnya (Yuwono, 2011).

3. Model Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian diharapkan mampu merubah keadaan perekonomian suatu negara menjadi lebih maju melalui pembangunan pertanian. Sehingga perubahan demi perubaha akan terus dilakukan demi mencapai tujuan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, model pembangunan terus dikembangan dalam rangka mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Menurut Hayami dan Ruttan yang dikutip oleh Yuwono (2011) terdapat beberapa model dalam teori pembangunan pertanian yaitu :

a. *The Resource Exploitation Model*

Model ini menggambarkan tentang kenaikan produksi yang disebabkan oleh tersedianya peluang pasar baru. Demi meningkatkan produktivitas maka petani akan terus menerus membuka lahan baru, dikarenakan tidak adanya perkembangan teknologi dalam pertanian sehingga model ini tidak berkelanjutan. Pemanfaatan lahan pertanian tersebut mengakibatkan menurunnya produktivitas dan tenaga kerja.

b. *The Conservation Model*

Model ini mengutamakan pada pemeliharaan kesuburan tanah dengan memanfaatkan sumber daya nabati dan hewani. Akan tetapi model ini tidak mampu melepaskan Negara berkembang dari kekurangan pangan karena pertumbuhan yang dihasilkan relative rendah yaitu hanya 1%.

c. *The Urban-Industrial Impact Model* atau *The Locational Model*

Model ini menitikberatkan pembangunan pertanian yang berbasis pada pengaruh permintaan pasar dari sektor industry. Pertanian didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan sektor industri dengan cara mengubah hasil pertanian menjadi bahan baku industri. Sebagai contohnya yaitu semakin banyaknya petani yang menanam cengkeh karena industri rokok di negara mempunyai perkembangan pesat.

d. *Diffusion Model*

Pada model ini mengutamakan penyebaran teknologi dan cara-cara bertani yang lebih produktif. Namun model ini sulit untuk diterapkan karena adanya gap baik antar petani, daerah ataupun antar negara.

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa tidak semua petani mampu mengakses teknologi pertanian, banyak petani di negara berkembang yang masih memiliki pengetahuan dan modal rendah sehingga pertanian masih konvensional, mereka tidak mampu memanfaatkan teknologi pertanian sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas.

e. *The High Pay Off Input*

Dilatar belakangi oleh buku Schlutz *Transforming Traditional Agriculture*. Schlutz sebagaimana dikutip oleh Yuwono (2013) memaparkan bahwa petani di negara berkembang yang kecil dan miskin secara ekonomi rasional lemah dalam alokasi sumberdaya dan kesulitan mengakses teknologi yang ada. Hal tersebut mendorong lahirnya *high pay off input model* yaitu perubahan kearah investasi sektor publik dalam pertanian penelitian pertanian untuk menghasilkan teknologi yang unggul, penyuluhan dan pendidikan pertanian untuk menyiapkan petani dalam memanfaatkan teknologi baru hasil pertanian dan industri hasil input pertanian. Sehingga pada akhir dasawarsa 1960an menghasilkan lahirnya revolusi hijau.

f. *Induced Agricultural Development* atau *Induced Innovation*

Dalam model ini dinyatakan bahwa perkembangan teknologi untuk pertumbuhan pertanian harus disesuaikan dengan keadaan sumberdaya yang terdapat di tempat tersebut. Sehingga penggunaan teknologi pertanian yang digunakan di suatu negara akan berbeda dengan negara lain menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada pada masing-masing

negara tersebut. Dengan menyesuaikan sumberdaya alam yang tersedia dan teknologi pertanian yang digunakan, diharapkan mampu memperoleh hasil pertanian yang terbaik.

4. Tujuan Pembangunan Pertanian

Menurut Fatah (2006) pembangunan pertanian memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani melalui sistem dan usaha agribisnis.
- b. Mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berbasis diversifikasi bahan pangan, kelembagaan dan sumberdaya pangan lokal.
- c. Meningkatkan daya saing produk dan ekspor pertanian.
- d. Pembangunan sistem agribisnis, perusahaan agribisnis berdaya saing, berkelanjutan, desentralisasi, kerakyatan yang bertujuan untuk mengembakan aktivitas ekonomi pedesaan.

Dari beberapa tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pembangunan pertanian adalah proses pengembangan sektor pertanian dari berbagai aspek baik dari segi produktivitas, cara pertanian, maupun kemampuan petani dalam melakukan usaha tani sehingga dapat menghasilkan suatu produk pertanian yang bernilai tinggi dan bermanfaat bagi ketersediaan pangan masyarakat serta kesejahteraan keluarga petani sendiri.

5. Produktifitas Pertanian

Produksi ditinjau dari pengertian teknis merupakan suatu proses pendayagunaan sumber-sumber yang telah tersedia, dengan mana diharapkan terwujudnya hasil yang lebih dari segala pengorbanan yang telah diberikan. Ditinjau dari pengertian ekonomi merupakan suatu proses

pendayagunaan segala sumber yang tersedia untuk mewujudkan hasil yang terjamin kualitas dan kuantitasnya, terkelola dengan baik, sehingga merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan sehingga tercapailah usahatani yang produktif (Kartasapoetra, 1988).

Produksi adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang. Teori produksi mempelajari tentang perilaku produsen dalam menentukan berapa output yang akan dihasilkan dan ditawarkan pada berbagai tingkatan harga sehingga keuntungan maksimal dapat dicapai. Produksi merupakan hasil akhir dari suatu proses produksi. Pendapatan yang diterima oleh produsen sangat tergantung kepada produksi yang akan diperoleh, sedangkan produksi tergantung dari faktor produksi yang ada (Poli, 1992).

Produktivitas merupakan hasil per satuan lahan, tenaga kerja, modal (misalnya ternak, uang), waktu atau input lainnya (misalnya uang tunai, energi, air dan unsur hara). Orang luar cenderung mengukur produktivitas usaha tani menurut hasil total biomassa, hasil komponen-komponen tertentu (misalnya gabah, jerami, kandungan protein), hasil ekonomis atau keuntungan, sering kali memandang perlu untuk memaksimalkan hasil per satuan lahan. Keluarga petani dan individu-individu di dalam keluarga itu memiliki cara mereka sendiri untuk merumuskan dan mendefinisikan produktivitas, mungkin dengan satuan tenaga kerja yang dibutuhkan pada saat penanaman atau penyiangan, atau dengan satuan air irigasi yang dimanfaatkan. Memang penting sekali,

bahwa orang luar perlu menyadari parameter ini, karena parameter ini sangat mebnentukan bagi petani (Reintjes dkk, 1999).

Produktivitas tanah pertanian sangat berbeda-beda baik diukur dalam bentuk keluaran kasar perhektar, yang disebut "hasil" atau kadang-kadang "hasil perhektar", maupun dalam bentuk produk tanah fisik marginal, di mana keluaran dari kedua bidang tanah itu dibandingkan, dengan semua masukan faktor yang identik atau setelah dikurangi dengan kontribusi dari masukan-masukan lainnya. (Kartasapoetra dkk, 1988).

Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumberdaya yang digunakan (input). Dengan kata lain bahwa produktivitas memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah evektivitas yang mengarah pada pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya (Umar, 1998). Berdsarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa produktifitas pertanian adalah perbandingan antara hasil pertanian yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya pertanian yang digunakan.

F. Pembangunan Ekonomi Daerah

1. Definisi Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan Ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumberdaya yang

ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut” (Arsyad, 2010). Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menaksir potensi setiap sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Safi’i (2008) mengandaikan pembangunan yang ada di daerah berdasarkan paradigma baru pembangunan ekonomi daerah mencakup hal berikut :

- a. Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah bersangkutan, serta kebutuhan dan kemampuan daerah menjalankan pembangunan.
- b. Pembangunan daerah tidak hanya terkait dengan sektor ekonomi semata melainkan keberhasilannya juga terkait dengan faktor lainnya seperti sosial, politik, hukum, budaya, birokrasi, dan lainnya.
- c. Pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas dan yang memiliki pengaruh untuk menggerakkan sektor lainnya secara lebih cepat.

2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta : petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan.

Ada tiga implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah:

- a. perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
- b. sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional.
- c. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi

yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan.

Strategi pembangunan ekonomi di masa lalu telah mengubah struktur ekonomi secara mengesankan dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun, perubahan struktur ekonomi ini hanya terjadi pada level nasional, sedangkan pada level daerah secara agregat relatif stagnan, terutama daerah-daerah di luar pulau Jawa. Ini berarti bahwa peranan dan partisipasi daerah dalam pembangunan ekonomi nasional belum optimal.

Untuk meningkatkan peranan dan partisipasi daerah dalam pembangunan ekonomi nasional, tidak ada cara lain selain daripada membangun perekonomian daerah dengan menerapkan Strategi Agroindustri Berorientasi Ekspor di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan secara serius dengan menerapkan Strategi Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis. Hal ini menuntut adanya penataan ulang kelembagaan yang ada saat ini, yang salah satu diantaranya adalah reorganisasi Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, dan Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Departemen Agribisnis Pertanian, Departemen Agribisnis Kehutanan, dan Departemen Agribisnis Kelautan dan Perikanan. Jika Strategi Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis berjalan dengan baik, maka seluruh daerah akan memberikan kontribusi secara optimal terhadap

pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah, mengurangi pengangguran, serta mengurangi tingkat kemiskinan.

3. *Local Economic Resources Development (LERD)*

Local Economic Resources Development (LERD) menurut World Bank adalah proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di area lokal (Waskita, 2012). Definisi lain tentang LERD diungkapkan oleh International Labour Organization (ILO) sebagai proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara duniausaha, pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumberdaya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi” (Waskita, 2012).

Inti dari LERD adalah proses pembangunan ekonomi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui optimalisasi berbagai sumberdaya lokal.

Tujuan dan sasaran LERD (Said dalam Waskita, 2012) yaitu :

- a. Terlaksananya upaya percepatan pembangunan ekonomi local melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat local dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses partisipatif
- b. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis upaya percepatan pengembangan ekonomi local diantara stakeholder yang sinergis

- c. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi lokal
- d. Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomi dan berkelanjutan
- e. Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB
- f. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan
- g. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat antar sektor dan antar wilayah
- h. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat Lokal

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perhitungan Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Di Indonesia dalam menghitung PDRB menggunakan pendekatan produksi. Produk domestik regional bruto didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) (<http://www.bi.go.id>).

Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas, dan air bersih (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel, dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi (8) keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).

Penyajian PDRB dilakukan dengan 2 cara (Fadlan, 2011), antara lain :

- a. PDRB atas dasar harga berlaku
Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumberdaya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.
- b. PDRB atas dasar harga konstan
Menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

5. LQ (*Location Quotient*)

Dalam pembangunan ekonomi daerah, yang patut dikembangkan adalah sektor ekonomi yang menjadi basis. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengelompokkan setiap sektor ekonomi apakah termasuk sektor ekonomi basis ataukah nonbasis. Maka dari itu diperlukan *Location Quotient* (LQ) (Arsyad, 2010) yaitu “suatu metode analisis tidak langsung yang digunakan untuk mengukur kinerja basis ekonomi suatu daerah, artinya bahwa analisis ini digunakan untuk melakukan pengujian sektor-sektor ekonomi yang termasuk dalam kategori sektor unggulan.”

Menurut Riyadi dan Deddy (2004) LQ dimaksudkan untuk mengetahui gambaran umum mengenai kemampuan sektor-sektor pembangunan di suatu wilayah dalam mendukung proses pembangunan di daerahnya. Caranya dengan membandingkan kegiatan (industri) daerah tersebut dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian provinsi atau nasional.

Menurut Ron Hood (dalam Putra, 2011), teknik LQ merupakan suatu pengembangan ekonomi yang lebih lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam pendekatan model ekonomi basis sebagai langkah untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu (*leading sector*) pertumbuhan suatu daerah. Dalam pembahasannya, sering difokuskan pada aspek tenaga kerja dan pendapatan. Hal ini penting menurut Putra (2011), bagi kebijakan publik dan pemerintah daerah, sebab dalam pelaksanaan pembangunan baik di tingkat daerah maupun regional, pemerintah perlu untuk mengetahui sektor mana yang harus mendapat proporsi APBD lebih besar, dan mana yang tidak/belum terlalu urgent untuk di tempatkan sebagai prioritas.

Berikut ini adalah kriteria penggolongan LQ :

- a. LQ lebih besar dari satu ($LQ > 1$)

Berarti sektor tersebut merupakan sektor potensial artinya produksi sektor/komoditas yang bersangkutan sudah melebihi kebutuhan konsumsi di daerah dimana komoditas tersebut dihasilkan dan kelebihannya dapat dijual ke luar daerah.

- b. LQ lebih kecil dari satu ($LQ < 1$)

Sektor tersebut belum mencukupi kebutuhan konsumsi di daerah yang bersangkutan dan pemenuhannya didatangkan dari daerah lain.

Dalam kondisi seperti ini, akan terlihat kurang bijak apabila secara

ekonomis pemerintah daerah mengalokasikan terlalu banyak APBD di sektor ini.

c. LQ sama dengan satu ($LQ = 1$)

Produksi sektor/komoditas yang bersangkutan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah setempat atau dengan kata lain sektor/komoditi tersebut habis dikonsumsi oleh daerah itu sendiri.

Keunggulan dari analisis LQ yaitu :

- a. Metode LQ sederhana dan tidak mahal serta dapat diterapkan pada data historis untuk mengetahui *trend*
- b. LQ dapat digunakan sebagai alat analisis awal untuk suatu daerah, yang kemudian dapat dilanjutkan atau dikombinasikan dengan analisis lainnya. Sedangkan kelemahan analisis LQ yaitu hasil perhitungannya sangat tergantung pada kualitas data

6. *Shift-Share*

Pada dasarnya, analisis *shift-share* (Arsyad,2010) menggambarkan kinerja dan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian suatu wilayah dengan membandingkannya dengan kinerja sektor-sektor wilayah yang lebih besar (provinsi/nasional). Dengan menggunakan *shift-share* dapat diketahui perubahan struktur ekonomi selama periode pengamatan tertentu. Analisis *shift-share* digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekan pertumbuhan sektor di daerah, yang dibandingkan

dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional.

Analisis tersebut dapat digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang lebih tinggi. Data yang biasa digunakan untuk analisis shift-share adalah pendapatan perkapita, PDRB, atau tenaga kerja dengan tahun pengamatan pada rentang waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktural suatu perekonomian daerah menurut Budiharsono (dalam Putra, 2011) ditentukan oleh tiga komponen:

- a. *National Share* (NS), yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian suatu daerah (kabupaten/kota/provinsi) dengan melihat nilai PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tinggi (provinsi/negara). Hasil perhitungan tersebut akan menggambarkan peranan provinsi yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Jika pertumbuhan daerah sama dengan pertumbuhan provinsi maka peranannya terhadap provinsi tetap.
- b. *Proportional (Industry-Mix)* adalah pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor (i) dibandingkan total sektor di tingkat provinsi. Komponen ini mengukur besarnya shift regional netto yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan
- c. *Competitive Potition*, adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat provinsi. Suatu daerah dapat saja memiliki keunggulan dibandingkan daerah lainnya karena lingkungan dapat mendorong sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat.

Keunggulan analisis *shift share*:

- a. Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi, walau analisis shift share tergolong sederhana

- b. Memungkinkan seorang pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat
- c. Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup akurat.

Kelemahan *shift share* :

- a. Hanya dapat digunakan untuk analisis *ex-post*
- b. Analisis ini tidak dapat digunakan untuk peramalan
- c. Tidak ada keterkaitan antar daerah
- d. Tidak dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antar sektor

7. Tipologi Sektoral

Analisis ini mengembangkan hasil perhitungan indeks *Location Quotient* komponen *Differential Shift/Competitif Position*, dan komponen *Proportional Shift/Industrial Mix* untuk ditentukan tipologi sektoral. Tipologi ini mengklasifikasikan sektor basis dan non basis serta komponen pertumbuhan internal dan eksternal. Dengan menggabungkan indeks LQ dengan komponen *Differential Shift* dan *Proportional Shift* dalam analisis *Shift Share*, tipologi sektoral ini diharapkan dapat memperjelas dan memperkuat hasil analisis (Fadlan, 2011).

Tipologi sektoral menurut Saerofi (dalam Fadlan,2011) sebagai berikut:

- a. Tipologi I : sektor tersebut adalah sektor basis dengan LQ rata-rata lebih dari 1 ($LQ > 1$), tingkat kompetitif suatu sektor ekonomi di daerah lebih tinggi dibandingkan provinsi ($C > 0$), dan di daerah pertumbuhannya juga cepat ($M > 0$).
- b. Tipologi II : sektor tersebut adalah sektor basis dengan LQ rata-rata lebih dari 1 ($LQ > 1$) dan sektor ekonomi di daerah lebih kompetitif dibandingkan provinsi ($C > 0$), dan di daerah pertumbuhannya lambat ($M < 0$).
- c. Tipologi III : sektor tersebut adalah sektor basis dengan LQ rata-rata lebih dari 1 ($LQ > 1$) dan sektor ekonomi di daerah kurang kompetitif dibandingkan provinsi ($C < 0$), karena ditingkat daerah pertumbuhannya cepat ($M > 0$).
- d. Tipologi IV : sektor tersebut adalah sektor basis dengan LQ rata-rata lebih dari 1 ($LQ > 1$), sektor ekonomi di daerah kurang kompetitif dibandingkan provinsi ($C < 0$), padahal di tingkat daerah pertumbuhannya lambat ($M < 0$).
- e. Tipologi V : sektor tersebut adalah sektor non basis dengan LQ rata-rata kurang dari 1 ($LQ < 1$) dan sektor ekonomi di daerah lebih kompetitif dibandingkan provinsi ($C > 0$), dan di tingkat daerah pertumbuhannya juga cepat ($M > 0$).
- f. Tipologi VI : sektor tersebut adalah sektor non basis dengan LQ rata-rata kurang dari 1 ($LQ < 1$), sektor ekonomi di daerah lebih

- kompetitif dibandingkan provinsi ($C > 0$), dan di tingkat daerah pertumbuhannya lambat ($M < 0$).
- g. Tipologi VII : sektor tersebut adalah sektor non basis dengan LQ rata-rata lebih dari 1 ($LQ > 1$) sektor ekonomi di daerah kurang kompetitif dibandingkan provinsi ($C < 0$), sedangkan di tingkat daerah pertumbuhannya cepat ($M > 0$).
- h. Tipologi VIII : sektor tersebut adalah sektor basis non dengan LQ rata-rata kurang dari 1 ($LQ < 1$) dan sektor ekonomi di daerah tidak kompetitif dibandingkan provinsi ($C < 0$), sedangkan di tingkat daerah pertumbuhannya lambat ($M < 0$).

Tabel 4. Tipologi Sektoral

Tipologi	LQ	M	C	Tingkat Potensial
I	$LQ > 1$	$M > 0$	$C > 0$	Istimewa
II	$LQ > 1$	$M > 0$	$C > 0$	Baik Sekali
III	$LQ > 1$	$M > 0$	$C > 0$	Baik
IV	$LQ > 1$	$M > 0$	$C > 0$	Lebih daru cukup
V	$LQ < 1$	$M < 0$	$C < 0$	Cukup
VI	$LQ < 1$	$M < 0$	$C < 0$	Hampir cukup
VII	$LQ < 1$	$M < 0$	$C < 0$	Kurang
VIII	$LQ < 1$	$M < 0$	$C < 0$	Kurang sekali

Sumber: Dini dalam Fadlan (2011)

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu dapat diambil dari jurnal, skripsi, thesis, maupun disertasi yang memiliki

kesamaan topik, tempat dan metode analisis. Adapun penelitian terdahulu yang diambil oleh penulis dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 5. Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	Analisis Potensi Wilayah Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah Penulis : Mukhammad Iqbal Rakhmatullah Tahun : 2015	Jenis Pendekatan : Kuantitatif Metode Analisis : 1. Penentuan PDRB 2. Analisis LQ 3. Analisis <i>Shift Share</i> 4. Analisis Tipologi Sektoral	1. Hasil analisis LQ, <i>shift share</i> , dan tipologi sektoral menunjukkan sektor pertanian menjadi sektor basis di Kabupaten Lumajang 2. Strategi untuk meningkatkan daya saing daerah antara lain penguatan system inovasi daerah dan strategi pengembangan komoditi unggulan
2.	Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dalam Upaya Peningkatan PDRB Kabupaten Pati Pebulis : Arif Syarifudin Tahun 2013	Jenis Pendekatan : Kuantitatif Metode Analisis : 1. Analisis LQ 2. Skalogram 5. Overlay	1. Hasil Analisis LQ menunjukkan kecamatan yang memiliki produksi tanaman padi paling besar di Kabupaten Pati adalah Kecamatan Wedarijaksa 2. Hasil Analisis Skalogram menunjukan bahwa Kecamatan yang memiliki kelengkapan infrastruktur paling baik di Kabupaten Pati yaitu Kecamatan Pati 3. Hasil Analisis Overlay menunjukan bahwa ada 5 Kecamatan yang menjadi sentra produksi tanaman padi yaitu Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Pati, Kecamtan Gabus, dan Kecamatan Margorejo
3.	Analisis Sektor Pertanian dalam Struktur Perekonomian di Kabupaten Kulon Progo Penulis : Shofyan Thohir Tahun : 2013	Jenis Pendekatan : Kuantitatif Metode Analisis : 1. Analisis LQ 2. Analisis Shift Share	1. Sektor Perekonomian basis di Kabupaten Kulon Progo adalah Sektor Pertanian 2. Sub Sektor pertanian basis di Kabupaten Kulon Progo adalah sub sektor tanaman perkebunan, peternakan, dan kehutanan

Sumber : Olahan Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian, seorang peneliti harus menggunakan suatu metode penelitian tertentu yang sesuai dengan permasalahan atau obyek yang akan diteliti. Metode penelitian ini sangat penting karena sebagai pedoman peneliti agar hasil penelitian dapat diinterpretasikan dengan baik. Metode merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara. Sedangkan penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang membutuhkan suatu jawaban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metode penelitian memiliki beberapa unsur pendukung, meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dengan alasan bahwa dalam penelitian ini akan menggambarkan potensi wilayah berbasis komoditas pertanian beserta faktor pendukung dan penghambat pengembangan potensi pertanian di

Kabupaten Pati, kemudian dalam menganalisis data yang diperoleh akan dilakukan secara statistik dengan menggunakan data angka/numerik.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk memberikan batasan terhadap masalah yang akan dibahas atau dikaji sehingga objek yang akan diteliti layak dan tidak meluas serta dapat menemukan solusi atau jawaban terbaik untuk mengatasi masalah yang ada dan proses pemberdayaan selanjutnya. Hal tersebut senada dengan konsep yang dipaparkan oleh Moleong (2007), bahwa ada dua tujuan dalam penentuan fokus penelitian yaitu: pertama, penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat dan objek akan menjadi layak untuk diteliti. Kedua, penetapan fokus secara efektif menetapkan kriteria untuk menyaring informasi yang masuk. Melalui penetapan fokus penelitian, dapat membatasi studi agar menjadi lebih terarah dan tidak melebar kepada masalah yang lebih luas sehingga informasi yang diperoleh saat melakukan penelitian menjadi relevan dengan permasalahan. Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sektor pertanian menjadi sektor basis di Kabupaten Pati, meliputi :
 - a. Analisis sektoral Kabupaten Pati
 - b. Analisis sub sektor pertanian kabupaten Pati

2. Bagaimana peran sektor pertanian dalam meningkatkan produktifitas pertanian di Kabupaten Pati, meliputi :
 - a. Peran Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
 - b. Peran Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu
 - c. Peran Sub Sektor Perikanan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap obyek yang akan diteliti, maka lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Pati. Sedangkan situs penelitian ini adalah menunjukkan dimana sebenarnya peneliti dapat menangkap keadaan dari objek yang akan diteliti, sehingga keakuratan data yang dibutuhkan bisa didapatkan. Maka situs penelitian ini adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati

D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Peneliti menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data ini diambil sebagai informasi utama yang akan diolah dan disajikan pada penyusunan skripsi. Data tersebut adalah PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2012-2016. Data ini dipilih dengan alasan penelitian ini berfokus pada analisis sektoral. Jadi data yang dipakai lebih cocok menggunakan PDRB ADHK.

2. Sumber Data

Data diperoleh dari literatur-literatur yang ada serta dokumen SKPD terkait sesuai dengan tema penelitian. Data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh ataupun diolah pihak lain yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi, yaitu teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data yang dibutuhkan berasal dari dokumen yang dihasilkan oleh SKPD Kabupaten Pati antara lain RPJMD Kabupaten Pati tahun 2013-2018, Kabupaten Pati dalam Angka tahun 2012-2016, PDRB Kabupaten Pati 2012-2016, Statistik Daerah Kabupaten Pati 2016 dan dokumen yang dihasilkan oleh SKPD Provinsi Jawa Tengah yaitu RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah Dalam Angka 2012-2016 dan PDRB Provinsi Jawa Tengah 2012-2016.

E. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan mengacu pada rumusan dan tujuan penelitian. Menyajikan data mengenai hasil perhitungan PDRB ADHK tahun 2012-2016 yang akan menentukan potensi komoditas pertanian Kabupaten Pati.

1. *Location Quotient (LQ)*

Location quotient merupakan suatu pendekatan tidak langsung yang digunakan untuk mengatur kinerja basis ekonomi suatu daerah, artinya bahwa analisis itu digunakan untuk melakukan pengujian sektor-sektor ekonomi yang termasuk dalam sektor unggulan (Arsyad dalam Fadlan, 2010)

Rumusan LQ dalam penentuan dinyatakan dalam persamaan berikut :

$$LQ = \frac{X_i/X}{N_i/N}$$

Keterangan :

LQ = nilai *Location Quotient* (LQ)

X_i = produksi sektor i di daerah analisis pada tahun tertentu

X = Total PDRB daerah analisis

N_i = Produksi sektor i provinsi daerah analisis pada tahun tertentu

N = Total PDRB provinsi daerah analisis

2. *Shift – Share*

Analisis *Shift Share* adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan

membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional). Teknik analisis *shift share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah, seperti tenaga kerja, nilai tambah, pendapatan atau output, selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh: pertumbuhan nasional (N), *industrial mix*/bauran industri (M), dan keunggulan kompetitif (C). Bentuk umum persamaan dari analisis shift share dan komponenkomponennya adalah :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Keterangan :

i = Sektor-sektor ekonomi yang diteliti

j = Variabel wilayah yang diteliti Kabupaten Pati

n = Variabel Provinsi Jawa Timur

D_{ij} = Perubahan sektor i di Kabupaten Pati

N_{ij} = Pertumbuhan nasional sektor i di Kabupaten Pati

M_{ij} = Bauran industri sektor i di Kabupaten Pati

C_{ij} = Keunggulan kompetitif sektor i di Kabupaten Pati

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah PDRB yang dinotasikan sebagai (E). maka :

$$D_{ij} = E^*_{ij} - E_{ij}$$

$$N_{ij} = E_{ij} \cdot (r_n)$$

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Keterangan :

E_{ij} = PDRB sektor i di Kabupaten Pati awal tahun analisis

E^*_{ij} = PDRB sektor i di Kabupaten pati akhir tahun analisis

r_{ij} = Laju pertumbuhan sektor i di Kabupaten Pati

r_{in} = Laju pertumbuhan sektor i di Provinsi Jawa Tengah

r_n = Rata-rata Laju pertumbuhan GNP di Provinsi Jawa Tengah

Rata-rata laju pertumbuhan PDRB di provinsi Jawa Tengah (r_n)

didefinisikan sebagai berikut :

$$r_{ij} = \frac{E^*_{ij} - E_{ij}}{E_{ij}}$$

$$r_{in} = \frac{E^*_{in} - E_{in}}{E_{in}}$$

$$r_n = \frac{E^*_n - E_n}{E_n}$$

Keterangan :

E_{in} = PDRB sektor i di provinsi jawa timur awal tahun analisis

E^*_{in} = PDRB sektor i di provinsi jawa timur akhir tahun analisis

E_n = total PDRB semua sektor i di provinsi jawa timur

E^*_n = total PDRB semua sektor i di provinsi jawa timur akhir tahun

Analisis

Sehingga persamaan tersebut bisa dijabarkan sebagai berikut :

$$D_{ij} = E_{ij} \cdot r_n + E_{ij} (r_{in} - r_n) + E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

F. Variabel dan Pengukuran

Variabel merupakan objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian pada suatu penelitian (Arikunto, 2006). Adapun variabel diskrit adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Variabel, Indikator dan Pengukuran

No	Variabel	Indikator	Pengukuran
1	Sektor Potensial. Variabel yang menggambarkan tingkat produktivitas suatu sektor ekonomi di daerah	LQ > 1 LQ = 1 LQ < 1	Jika hasilnya > 1, maka sektor tersebut adalah sektor potensial karena sektor tersebut melebihi kebutuhan daerah Jika hasilnya = 1, maka sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah Jika hasilnya < 1, maka sektor tersebut bukan sektor potensial (unggulan) karena sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan daerah
2	<i>National Share</i> (N). Variabel yang menunjukkan peranan ekonomi provinsi terhadap perekonomian daerah seandainya laju pertumbuhannya sama	N > pergeseran ekonomi daerah N < Pergeseran ekonomi daerah	Jika N lebih besar dari pergeseran ekonomi daerah, maka peranan ekonomi provinsi berperan negatif terhadap perekonomian daerah Jika N lebih kecil dari pergeseran ekonomi daerah, maka peranan ekonomi provinsi berperan positif terhadap perekonomian Daerah
3	<i>Propotional Shift</i> atau <i>Industrial Mix</i> (M). Variabel yang menunjukkan tingkat kinerja suatu sektor	M bernilai (+) positif. M bernilai (-) negatif	Jika M bernilai (+), maka kinerja sektor ekonomi di daerah tumbuh lebih cepat dibandingkan provinsi Jika M bernilai (-), maka

	ekonomi di daerah dengan sektor yang sama di provinsi		kinerja sektor ekonomi di daerah tumbuh lebih lambat dibandingkan provinsi
4	<i>Differential Shift</i> atau <i>Competitive Position</i> (C). Variabel yang menunjukkan tingkat kompetitif suatu sektor di daerah dengan sektor yang sama di provinsi	C bernilai (+) positif. C bernilai (-) negatif	Jika C bernilai (+), berarti sektor ekonomi di daerah lebih kompetitif dibandingkan provinsi Jika C bernilai (-), berarti sektor ekonomi di daerah kurang kompetitif dibandingkan provinsi

Sumber : Olahan Penulis

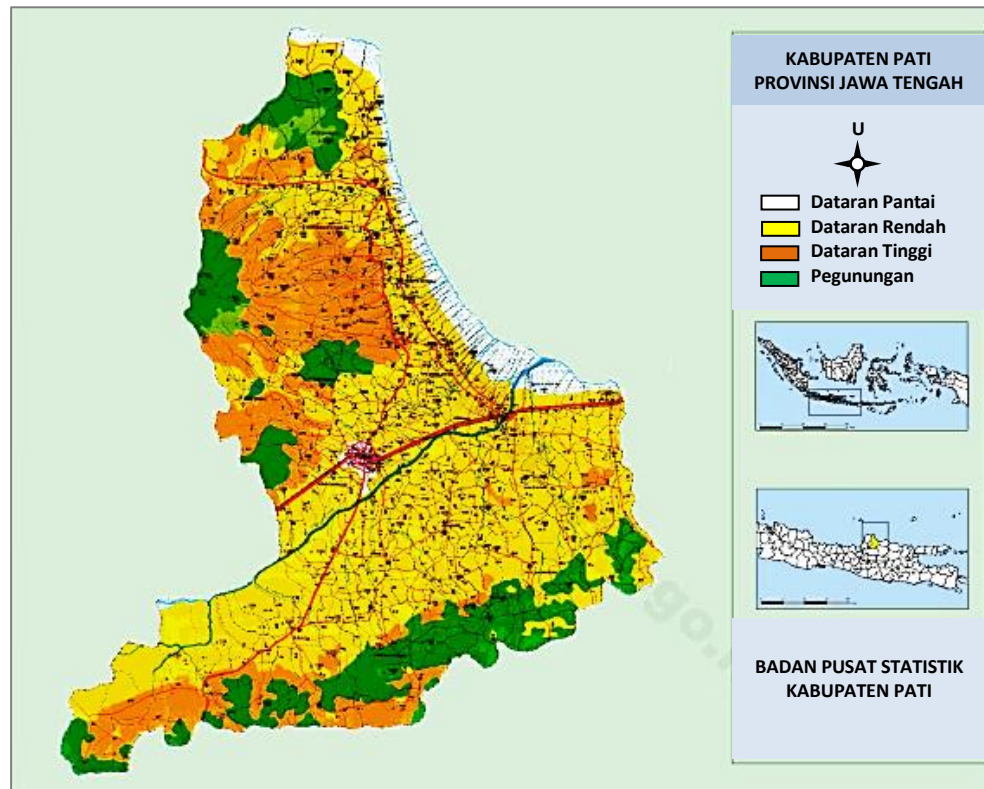
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pati

1. Kondisi Geografis Kabupaten Pati

Kabupaten Pati secara geografis terletak antara 110,50° – 111,15° Bujur Timur (BT) dan 6,25° – 7,00° Lintang Selatan (LS). Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas wilayah 150.368 Ha terdiri dari 59.332 Ha lahan sawah dan 91.036 Ha lahan bukan sawah. Kabupaten Pati yang berjarak 75 Km dari Ibu Kota Jawa Tengah (Semarang), mempunyai panjang garis pantai 60 Km dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
Sebelah Timur	: Kabupaten Rembang dan Laut Jawa
Sebelah Barat	: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
Sebelah Selatan	: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Pati

Sumber: Kabupaten Pati dalam Angka 2017

Secara garis besar wilayah Kabupaten Pati dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, sebagai berikut :

a) Daerah Dataran Pantai

Daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 0-7 m DPL Di atas Permukaan air Laut (DPL). 16 Kecamatan terdiri dari Kecamatan Dukuhseti, Margoyoso, Tayu, Trangkil, Pati, Jaken serta sebagian Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Pucakwangi, Margorejo, Jakenan, Gabus, Batangan, Juwana dan sebagian Kecamatan Wedarijaksa.

b) Daerah Dataran Rendah

Daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 7-100 m DPL yang meliputi 9 Kecamatan terdiri dari sebagian kecil Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, Pucakwangi, Margorejo, Tlogowungu, Gunungwungkal dan sebagian Kecamatan Cluwak.

c) Daerah Dataran Tinggi

Daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 100 - 500 m DPL yang meliputi sebagian Kecamatan Kayen, Sukolilo, Winong, Tambakromo, Margorejo, Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkal, Cluwak dan Kecamatan Pucakwangi.

d) Daerah Pegunungan

Daerah pegunungan terbagi menjadi dua, yaitu daerah dengan ketinggian antara 500 – 1.000 m DPL di atas permukaan laut, meliputi sebagian Wilayah Kecamatan Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkal dan Cluwak. Serta daerah berketinggian di atas 1000m DPL di atas permukaan laut yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gembong, Tlogowungu, dan Gunungwungkal.

Kabupaten Pati juga memiliki jenis tanah yang beragam. Jenis tanah di bagian Utara Kabupaten Pati terdiri dari tanah Red Yellow mediteran, Latosol, Alluvial, Hidromer dan Regosol, sedangkan bagian Selatan terdiri dari tanah

Alluvial, Hidromer dan Grumosol. Rincian jenis tanah menurut kecamatan seperti di bawah ini :

- a) Batangan, merupakan termasuk pada jenis tanah alluvial
- b) Cluwak, Gunungwungkal dan Gembong merupakan tanah latosol
- c) Juwana dan Margoyoso merupakan tanah alluvial, mediteran coklat tua dan mediteran coklat
- d) Pati dan Margorejo merupakan tanah red yellow mediteran, latosol, alluvial dan hidromer
- e) Kayen dan Tambakromo merupakan tanah alluvial dan hidromer
- f) Pucakwangi dan Winong merupakan tanah grumosol dan hidromer
- g) Wedarijaksa merupakan tanah mediteran coklat tua, mediterane coklat, alluvial dan grumosol
- h) Tayu merupakan tanah alluvial, mediteran coklat tua, mediteran coklat, dan regosol
- i) Tlogowungu merupakan tanah latosol dan red yellow mediteran

Kondisi hidrologi di Kabupaten Pati terdiri dari air permukaan tanah dan air bawah tanah, kondisi hidrologi terbagi atas :

- a) Air Permukaan Tanah

Air permukaan tanah di Kabupaten Pati mencakup waduk, bendungan, dan sungai-sungai yang berpotensi sebagai sumber air. Kabupaten Pati mempunyai dua waduk yaitu Seloromo dan Gunungrowo. Sedangkan

sungai yang berada di Kabupaten Pati bagian utara adalah Sungai Sani, Simo, Kersulo, Bapoh, Tayu, Sat, Brati dan Juwana. Adapun sungai yang berada di wilayah Pati bagian selatan antara lain adalah Sungai Widodaren, Brati, Lembang, Godo, Gono, Kedunglo dan Sentul.

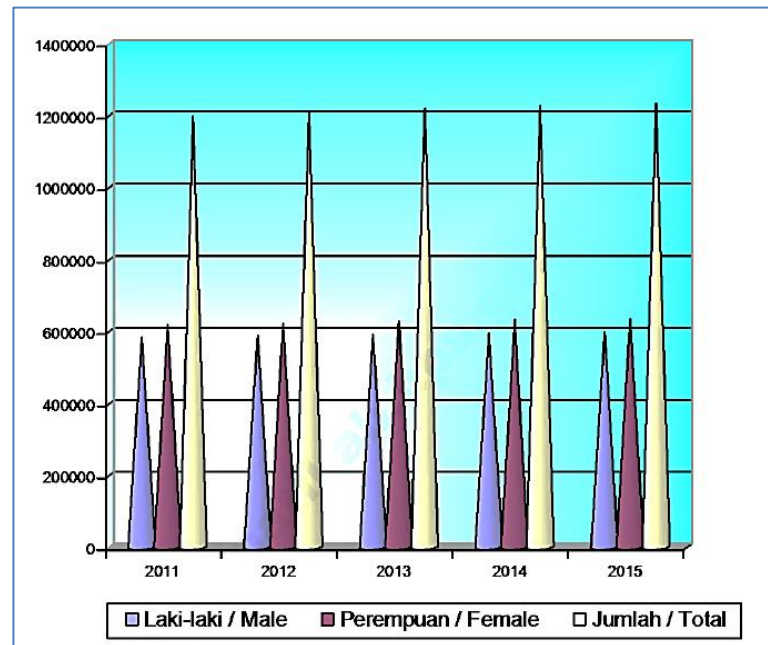
- b) Air Bawah Tanah : Air bawah tanah yang diusahakan untuk sumber air minum maupun pengairan adalah terletak di empatkecamatan yaitu sumber air Widodaren, Sendangsoko, Bulu dan Lunggoh di Kecamatan Pucakwangi. Sedangkan di Kecamatan Tambakromo meliputi sumber air Maitan, Dogo dan Pakis. Kecamatan Kayen mempunyai sumber air Kluweh, Mangin dan Beketel. Sumber air di Kecamatan Sukolilo meliputi sumber air Lawang, Goa Wareh, Prawoto, Baleadi.

Keadaan iklim Kabupaten Pati tidak banyak mengalami perubahan pada musim kemarau maupun penghujan. Suhu udara terendah berkisar antara 23°C suhu udara tertinggi berkisar antara 34°C sedangkan curah hujan terendah 43mm/tahun. Curah hujan tertinggi 4.686mm/tahun.

2. Kondisi Demografis Kabupaten Pati

Penduduk Kabupaten Pati menurut hasil registrasi penduduk tahun 2010 dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Jumlah penduduk Kabupaten Pati tahun 2014 adalah 1.225.594 jiwa naik menjadi 1.232.912 jiwa pada tahun 2015. Namun tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 sebesar 0,60% lebih rendah dibanding tahun 2014 dengan pertumbuhan penduduk sebesar

0,62%. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar Grafik berikut :



Grafik 1. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pati Tahun 2011 –2015

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Pati 2016

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten pati selalu mengalami peningkatan dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015. Pertumbuhan penduduk di atas juga memuat pertumbuhan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pati Menurut Kecamatan Tahun 2014 – Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
		2015	2016	
1	Sukolilo	88.362	89.232	0,98
2	Kayen	71.938	72.380	0,61
3	Tambakromo	49.051	49.317	0,54
4	Winong	49.796	49.906	0,22
5	Pucakwangi	41.667	41.760	0,22
6	Jaken	42.559	42.654	0,22
7	Batangan	42.241	42.563	0,76
8	Juwana	93.876	94.745	0,93
9	Jakenan	40.628	40.719	0,22
10	Pati	105.814	106.432	0,58
11	Gabus	52.357	52.474	0,22
12	Margorejo	59.638	60.542	1,52
13	Gembong	43.701	44.048	0,79
14	Tlogowungu	50.238	50.493	0,51
15	Wedarijaksa	59.418	59.836	0,70
16	Trangkil	60.850	61.205	0,58
17	Margoyoso	72.280	72.732	0,63
18	Gunungwungkal	35.703	35.861	0,44
19	Cluwak	43.165	43.340	0,41
20	Tayu	65.094	65.240	0,22
21	Dukuhseti	57.218	57.433	0,38
Jumlah / Total		1.225.594	1.232.912	0,60

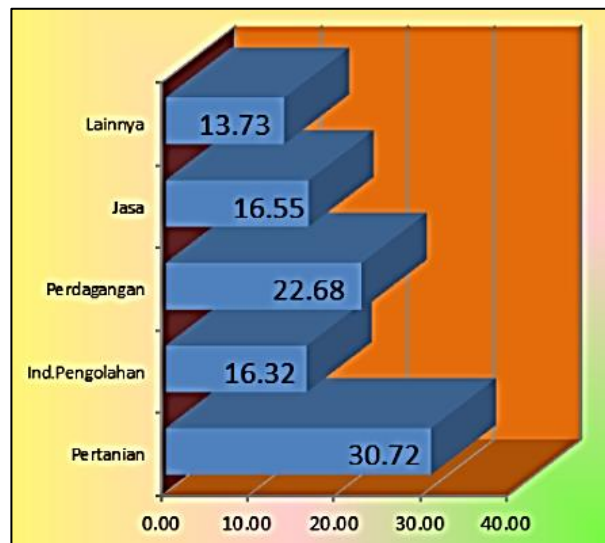
Sumber : Kabupaten Pati Dalam Angka 2017

Luas wilayah Kabupaten Pati 1.503 Km² dan kepadatan penduduk pada tahun 2015 sebesar 820 jiwa per kilometer persegi, hal ini berarti bahwa setiap satu kilometer persegi dihuni sekitar 820 jiwa.

a) Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap

penduduk usia kerja (usia 15+). TPAK Kabupaten Pati pada tahun 2014 sebesar 68,91% sedangkan tahun 2015 sebesar 67,83% (Statistik daerah Kabupaten Pati 2016). Ketersediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Pati dapat dilihat pada gambar grafik berikut :



Grafik 2. Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Pati 2015

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Pati

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa kesempatan bekerja di sektor pertanian masih mendominasi pasar kerja di kabupaten Pati dengan presentase 30,72%, kemudian disusul oleh sektor perdagangan 22,68%, sektor jasa 16,55%, sektor industri 16,32% dan sektor lainnya 13,73%.

b) Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah.

Penduduk usia sekolah dibagi menjadi empat kelompok SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun), SLTA (16-18 tahun), dan kelompok usia 19-24 tahun yang bersekolah di perguruan tinggi. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Pati dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 8. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Pati menurut Kelompok Umur Tahun 2013-2015

No	Kelompok Umur	2013	2014	2015
1	7 - 12	98,35	99,65	100
2	13 - 15	93,33	98,18	97,62
3	16 - 18	51,29	67,19	65,55
4	19 - 24	6,46	8,07	12,58

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Pati 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa angka partisipasi sekolah di Kabupaten Pati dari tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami kenaikan di semua kelompok umur. Pada tahun 2015 Angka Partisipasi Sekolah kelompok umur SD sebesar 100% sedangkan Angka Partisipasi Sekolah untuk kelompok umur 19-24 tahun sebesar 12,58%. Jika diamati lebih lanjut angka partisipasi sekolah Kabupaten Pati semakin menurun untuk jenjang umur yang lebih tua. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran mengenyam Pendidikan wajib cukup kecil.

B. Penyajian Data

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah

dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

a. Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

b. Fungsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

- 1) PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah.. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- 2) PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
- 3) Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
- 4) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk
- 5) PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

c. Ruang Lingkup Produk Domestik Regional Bruto

Ruang lingkup PDRB menyajikan uraian dan definisi masing-masing kategori dan sub kategori lapangan usaha.

1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Perusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. Kategori ini dibagi menjadi tiga sub kategori yaitu:

a) Pertanian, Peternakan, Perburuan dan jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual

b) Kehutanan dan Penebangan Kayu

Sub kategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak.

c) Perikanan

Sub kategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di

laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, *crustacea*, *mollusca*, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicapuk juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak

2) Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu:

- a) Pertambangan minyak dan gas bumi (migas)
- b) Pertambangan batubara dan lignit
- c) Pertambangan bijih logam
- d) Pertambangan dan penggalian lainnya

3) Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya.

4) Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Kategori ini mencakup dua sub kategori yaitu:

- a) Ketenagalistrikan
- b) Pengadaan Gas dan Produksi Es

5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi /lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya

6) Kontruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara

7) Perdagangan Besar dan Eceran, Repair Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi /lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran, yaitu penjualan tanpa perubahan teknis dari berbagai jenis barang dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut

8) Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Perdagangan terdiri atas:

- a) Angkutan rel dan Angkutan darat
- b) Angkutan laut
- c) Angkutan sungai, danau dan penyeberangan
- d) Angkutan udara
- e) Pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir

9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya.

10) Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau

mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya.

11) Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, mencakup empat sub kategori antara lain:

- a) Jasa Perantara Keuangan
- b) Asuransi dan Dana Pensiun
- c) Jasa Keuangan Lainnya
- d) Jasa Penunjang Keuangan

12) Real Estate

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bias dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah property berupa tanah dan bangunan.

13) Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan mencakup:

- a) Kegiatan professional, ilmu pengetahuan dan Teknik

b) Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan dan tour

14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib.

15) Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan Pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang Pendidikan.

16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan

kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.

17) Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi:

- a) Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi
- b) Jasa Reparasi Komputer, Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga
- c) Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga
- d) Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

2. Kondisi Perekonomian Kabupaten Pati

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Kabupaten Pati 2012-2016 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan alasan bahwa penelitian ini berfokus untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Pati, khususnya sektor pertanian dan sub sektor

pertanian. Adapun data PDRB Kabupaten Pati Atas Dasar Harga Konstan adalah sebagai berikut.

Tabel 9. PDRB Kabupaten Pati Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.678.000	5.902.448	5.833.742	6.281.187	6.531.664
2	Pertambangan dan Penggalan	378.085	405.306	430.795	441.033	461.019
3	Industri Pengolahan	5.520.584	5.984.883	6.380.180	6.680.746	6.991.047
4	Pengadaan Listrik dan Gas	22.161	24.153	26.456	27.326	28.667
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Limbah	14.859	14.641	15.356	15.627	16.227
6	Konstruksi	1.647.919	1.739.010	1.813.757	1.908.072	2.012.253
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	3.178.820	3.287.462	3.500.934	3.658.738	3.843.147
8	Transportasi dan Pergudangan	586.053	642.674	706.541	761.832	816.952
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	719.005	760.935	817.587	879.849	952.046
10	Informasi dan Komunikasi	445.748	486.915	583.470	640.887	702.540
11	Jas Keuangan dan Asuransi	521.219	546.758	566.832	601.845	644.145
12	Real Estate	227.767	242.821	258.938	276.716	295.118
13	Jasa Perusahaan	40.583	45.427	49.160	53.248	58.312
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	785.387	805.316	817.152	858.767	895.351
15	Jasa Pendidikan	751.901	825.903	913.564	983.636	1.054.753

16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177.504	190.039	210.411	226.276	246.572
17	Jasa Lainnya	376.733	404.865	440.338	456.541	490.143
Total PDRB		21.072.329	22.329.694	23.365.214	24.752.325	26.039.955

Sumber : PDRB ADHK Kabupaten Pati 2012-2016 – data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Pati adalah sektor pertanian. Diikuti oleh sektor industri dan pengolahan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor konstruksi; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa Pendidikan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor transportasi dan pergudangan; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor informasi dan komunikasi; sektor lainnya; sektor pertambangan dan penggalan; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor pengadaan listrik dan gas; dan yang paling kecil adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan penyumbang PDRB terbesar dari tahun 2012 mengalami kenaikan pada tahun 2013. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan dari 5.902.448 (juta rupiah) pada tahun 2013 menjadi 5.833.742 (juta rupiah) pada tahun 2014, kemudian pada tahun-tahun berikutnya relatif mengalami kenaikan. Dua sektor terbesar PDRB setelah sektor pertanian yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor relatif mengalami kenaikan dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Sebagai

perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pati Tahun 2012-2016 adalah PDRB Atas dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 10. PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	106.536.703,12	108.832.110,55	107.793.380,89	113.826.299,04	116.250.931,53
2	Pertambangan dan Penggalian	13.745.874,30	14.594.164,05	15.566.648,84	16.040.765,67	19.044.524,87
3	Industri Pengolahan	241.528.855,93	254.694.118,95	271.526.773,18	284.575.766,45	296.227.398,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	751.160,19	813.604,61	866.488,30	887.584,37	954.806,10
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Limbah	547.794,91	549.040,44	567.980,08	577.261,68	589.805,23
6	Konstruksi	70.034.622,63	73.465.919,37	76.681.876,60	81.286.113,22	86.875.267,97
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	101.058.608,68	105.825.306,31	110.899.193,58	115.299.085,85	121.181.123,88
8	Transportasi dan Pergudangan	20.818.468,63	22.760.150,97	24.868.280,75	26.807.881,97	28.592.166,82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20.871.604,64	21.812.570,05	23.471.641,07	25.064.275,14	26.668.736,81
10	Informasi dan Komunikasi	24.690.219,27	26.663.583,07	30.130.161,63	33.001.271,38	35.742.555,91
11	Jas Keuangan dan Asuransi	18.588.738,12	19.311.454,80	20.106.851,64	21.719.194,84	23.820.513,19
12	Real Estate	11.934.423,12	12.853.218,11	13.776.863,54	14.822.295,08	15.829.477,85
13	Jasa Perusahaan	2.087.130,46	2.340.118,40	2.526.615,62	2.741.142,86	3.032.330,20

14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20.373.579,95	20.912.828,39	21.075.646,54	22.194.694,80	22.720.443,65
15	Jasa Pendidikan	22.760.883,69	24.930.587,32	27.266.220,07	29.324.081,90	31.563.635,32
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.959.375,94	5.312.609,80	5.916.710,61	6.307.617,26	6.929.495,92
17	Jasa Lainnya	10.055.072,38	10.983.732,87	11.917.818,01	12.300.030,67	13.360.350,97
	Total PDRB	691.343.115,96	726.655.118,06	764.959.150,95	806.775.362,18	849.383.564,59

Sumber: PDRB ADHK Provinsi Jawa Tengah 2012-2016 – data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penyumbang PDRB Provinsi Jawa Tengah terbesar ditempati oleh sektor industri pengolahan. Diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; sektor konstruksi; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa pendidikan; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor transportasi dan pergudangan; sektor pertambangan dan penggalan; sektor real estate; sektor jasa lainnya; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; sektor jasa perusahaan; sektor pengadaan listrik dan gas, dan yang paling kecil ditempati oleh sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah.

Sektor industri pengolahan sebagai penyumbang PDRB terbesar Provinsi Jawa Tengah relatif mengalami kenaikan dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Penyumbang PDRB terbesar selanjutnya ditempati oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi

mobil dan motor. Tiga sektor penyumbang PDRB terbesar Provinsi Jawa Tengah sama dengan tiga sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Pati yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan; dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor.

C. Analisis Data

1. Analisis *Location Quotient*

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi manakah yang termasuk ke dalam sektor basis dan bukan sektor basis. Adapun hasil perhitungan LQ tiap sektor di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Nilai Location Quotient Tahun 2012-2016

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,75	1,78	1,78	1,81	1,84	1,79
2	Pertambangan dan Penggalian	0,90	0,91	0,91	0,90	0,79	0,88
3	Industri Pengolahan	0,75	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,97	0,97	1,00	1,01	0,99	0,99
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Limbah	0,89	0,87	0,89	0,89	0,90	0,89
6	Konstruksi	0,77	0,78	0,78	0,77	0,76	0,77
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	1,03	1,02	1,04	1,04	1,04	1,03
8	Transportasi dan Pergudangan	0,92	0,93	0,93	0,93	0,94	0,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,13	1,14	1,14	1,15	1,17	1,15

10	Informasi dan Komunikasi	0,59	0,60	0,64	0,64	0,64	0,62
11	Jas Keuangan dan Asuransi	0,92	0,93	0,92	0,91	0,89	0,91
12	Real Estate	0,63	0,62	0,62	0,61	0,61	0,62
13	Jasa Perusahaan	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,26	1,26	1,27	1,27	1,29	1,27
15	Jasa Pendidikan	1,08	1,09	1,10	1,10	1,10	1,09
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,17	1,17	1,17	1,18	1,17	1,17
17	Jasa Lainnya	1,23	1,21	1,21	1,22	1,20	1,21

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan perhitungan nilai LQ di Kabupaten Pati pada tabel di atas, dapat diketahui sektor-sektor basis di Kabupaten Pati. Didasarkan pada perhitungan LQ rata-rata dari tahun 2012 hingga tahun 2016 yang bernilai lebih dari satu ($LQ > 1$) dan merupakan sektor basis antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa Pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa lainnya. Sektor yang mendapatkan nilai LQ kurang dari satu ($LQ < 1$) bukan merupakan sektor basis di kabupaten Pati antara lain sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor konstruksi; sektor transportasi dan pergudangan; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; dan sektor jasa perusahaan.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor basis dengan nilai rata-rata LQ tertinggi yaitu 1,79 dari total tujuh belas sektor di Kabupaten

Pati. Hal ini menandakan bahwa sektor pertanian kehutanan dan perikanan berpotensi untuk dikembangkan karena produksinya melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat sehingga mampu untuk diekspor ke daerah lain. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memuat sub-sub sektor didalamnya, maka diperlukan pengamatan yang lebih mendalam dengan menganalisis sub-sub sektor didalamnya. Adapun analisis perhitungan LQ sub sektor pertanian kehutanan dan perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Nilai Location Quotient Sub Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2012-2016

No	Sub Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanain	0,95	0,96	0,95	0,96	0,98	0,96
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,41
3	Perikanan	2,10	2,12	2,24	2,31	2,33	2,22

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui sub sektor manakah yang paling potensial. Sub ektor perikanan memiliki nilai rata-rata perhitungan LQ lebih dari satu ($LQ > 1$) yang artinya sub sektor tersebut merupakan sub sektor basis dan paling potensial. Sementara itu sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian dan sub sektor kehutanan dan penebangan kayu memiliki nilai rata-rata LQ dibawah satu ($LQ < 1$). Urutan Nilai rata-rata perhitungan LQ sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari yang paling besar ke yang palling kecil antara lain sub sektor perikanan; sub sektor

pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian; dan sub sektor kehutanan dan penebangan kayu.

Meskipun pada tabel perhitungan nilai LQ sub sektor di atas terdapat dua sub sektor yang memiliki nilai rata-rata LQ dibawah satu ($LQ < 1$) bukan berarti kedua sub sektor tersebut bukan sub sektor basis. Perhitungan LQ di atas dimaksudkan untuk mengetahui sub sektor manakah yang paling basis sehingga memudahkan untuk memilih sub sektor yang paling berpotensi untuk dikembangkan. Kedua sub sektor tersebut juga merupakan sub sektor basis karena menurut perhitungan LQ sektoral Kabupaten Pati 2012-2016 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menempati urutan nilai LQ teratas.

2. Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan daerah yang lebih luas, dalam hal ini adalah Kabupaten Pati dengan Provinsi Jawa Tengah. Adapun hasil perhitungan *Shift Share* pada tabel berikut:

Tabel 13. Hasil Perhitungan *Shift Share* Tahun 2012-2016

No	Sektor Ekonomi	National Share	Industrial Mix	Competitif Position		<i>Shift Share</i>
				Nilai	Urutan	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.629.217,26	-1.111.485,93	335.932,67	1	853.664
2	Pertambangan dan Penggalian	108.485,84	37.255,37	-62.807,21	17	82.934
3	Industri Pengolahan	1.584.049,09	-333.813,80	220.227,71	2	1.470.463

4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.358,77	-350,73	497,96	9	6.506
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Limbah	4.263,57	-3.124,03	228,47	10	1.368
6	Kontruksi	472.845,73	-76.584,31	-31.927,43	16	364.334
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	912.114,90	-279.156,91	31.369,01	5	664.327
8	Transportasi dan Pergudangan	168.159,15	50.675,35	12.064,50	7	230.899
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	206.307,74	-6.602,59	33.335,85	4	233.041
10	Informasi dan Komunikasi	127.900,73	71.634,03	57.257,24	3	256.792
11	Jas Keuangan dan Asuransi	149.556,00	-2.859,62	-23.770,38	15	122.926
12	Real Estate	65.354,34	8.982,30	-6.985,64	13	67.351
13	Jasa Perusahaan	11.644,69	6.734,16	-649,84	11	17.729
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	225.355,06	-134.885,14	19.494,08	6	109.964
15	Jasa Pendidikan	215.746,76	75.050,29	12.054,95	8	302.852
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50.932,12	19.581,63	-1.445,75	12	69.068
17	Jasa Lainnya	108.097,90	15.740,84	-10.428,74	14	113.410
Total		6.046.389,64	-1.663.209,10	584.447,46		4.967.628

Sumber: Data Diolah

a. National Share

Nilai *national share* mengartikan peranan ekonomi provinsi terhadap perekonomian daerah pada periode tertentu. Berdasarkan tabel perhitungan *Shift Share* di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan komponen pertumbuhan ekonomi (*Shift Share*) Kabupaten Pati adalah 4.967.628 (juta rupiah). Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan total pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 6.046.389,64 (juta

rupiah). Hal tersebut dapat diartikan bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Pati masih dibawah pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah.

Jika nilai sektoral *Shift Share* lebih besar dari nilai sektoral national share artinya sektor tersebut memiliki pertumbuhan PDRB di atas PDRB Provinsi Jawa Tengah. Sektor yang memiliki nilai *Shift Share* lebih besar dari national share antara lain sektor pengadaan listriki dan gas; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi makan dan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor jasa Pendidikan; dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan PDRB dibawah PDRB Provinsi Jawa Tengah antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah; sektor kontruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; sektor jasa keuangan dan asuransi; serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

b. *Industrial Mix (Proportional Shift)*

Industrial mix merupakan komponen yang mengukur besarnya *net shift* yang disebabkan oleh komposisi sektor-sektor insudtri di Kabupaten Pati. Berdasarkan tabel perhitungan *Shift Share* di atas, dapat diketahui bahwa bauran industri Kabupaten Pati terhadap perekonomian Jawa Tengah

memiliki nilai negatif pada beberapa sektor, antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Sedangkan sektor yang memiliki nilai positif antara lain sektor pertambangan dan penggalan; sektor transportasi dan pergudangan; sektor informasi dan komunikasi; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor jasa Pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta sektor jasa lainnya. Sektor yang memiliki nilai positif artinya sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang tinggi di Kabupaten Pati dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah untuk sektor serupa.

c. *Competitif Position (Differential Shift)*

Sektor yang memiliki nilai *competitive position* negatif artinya sektor tersebut kurang kompetitif di Kabupaten Pati. Sektor-sektor tersebut antara lain sektor pertambangan dan penggalan; sektor konstruksi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta sektor jasa lainnya.

Sektor-sektor di Kabupaten Pati yang memiliki nilai *competitive position* positif, maka sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif terhadap sektor yang serupa di Provinsi Jawa Tengah. Sektor yang kompetitif antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengelolaan air, pengolahan sampah dan limbah; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa Pendidikan.

Berdasarkan tabel perhitungan *Shift Share* di atas, dapat diketahui bahwa nilai terbesar ditempati oleh sektor. industri pengolahan; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor. Sedangkan pada penilaian *competitive position* nilai terbesar ditempati oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan; serta sektor informasi dan komunikasi. Sektor pertanian menempati urutan pertama dalam *competitive position* artinya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang paling kompetitif untuk dikembangkan di Kabupaten Pati. Diperlukan analisis lebih mendalam untuk mengetahui sub sektor pertanian manakah yang paling kompetitif untuk

dikembangkan. Perhitungan *Shift Share* sub sektor pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 14. Hasil Perhitungan *Shift Share*
Sub Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan 2012-2016**

No	Sub Sektor Ekonomi	National Share	Industrial Mix	Competitif Position		<i>Shift Share</i>
				Nilai	Urutan	
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanain	724.935,15	111.582,32	175.816,97	1	1.012.334,44
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	12.916,66	-11.347,86	6.970,46	3	8.539,26
3	Perikanan	115.404,49	83.624,89	98.169,77	2	297.199,16
Total		853.256,30	183.859,35	280.957,20		1.318.072,86

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas total *Shift Share* sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah 1.318.072,86 dimana nilai tersebut lebih besar dari total *national share* 853.256,30, artinya pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian Kabupaten Pati lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian Jawa Tengah. Jika nilai sub sektoral *Shift Share* lebih besar dari nilai sub sektoral *national share* artinya sub sektor tersebut memiliki pertumbuhan PDRB di atas PDRB Provinsi Jawa Tengah, sub sektor tersebut antara lain sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian serta sub sektor perikanan. Sedangkan sub sektor kehutanan dan penebangan kayu memiliki nilai pertumbuhan PDRB dibawah Provinsi Jawa Tengah.

Pada penilaian *industrial mix*, sub sektor yang memiliki nilai positif yaitu sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian serta sub

sektor perikanan. Artinya sub sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang tinggi di Kabupaten Pati dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah pada sub sektor yang sama. Sedangkan sub sektor kehutanan dan penebangan kayu memiliki nilai negatif.

Competitive position sub sektor pertanian kehutanan dan perikanan yang memiliki nilai kompetitif terbesar adalah sub sektor pertanian, peternakan perburuan dan jasa pertanian; sub sektor perikanan dan sub sektor kehutanan dan penebangan kayu. Sub sektor pertanian, perikanan, peternakan, perburuan dan jasa pertanian memiliki nilai kompetitif tertinggi dan memiliki nilai tertinggi. Artinya sub sektor tersebut merupakan sub sektor yang paling potensial untuk dikembangkan.

3. Analisis Tipologi Sektoral

Analisis tipologi sektoral bertujuan untuk mengklasifikasikan sektor yang berpotensi untuk menjadi sektor basis dan nonbasis. Terdapat tiga komponen yang dinilai dalam analisis ini yaitu nilai *Location Quotient* (LQ), nilai *Industrial Mix* (M), dan *competitive position* (C). Ada delapan peringkat dalam analisis tipologi sektoral antara lain Istimewa, Baik sekali, Baik, Lebih dari cukup, Cukup, Hampir cukup, Kurang, dan Kurang sekali. Output dari analisis tipologi sektoral adalah untuk memperjelas dan memperkuat hasil analisis sebelumnya.

Tabel 15. Analisis Tipologi Sektoral

Sektor Ekonomi	LQ	M	C	Tipologi
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,79	-1.111.485,93	335.932,67	Baik
Pertambangan dan Penggalian	0,88	37.255,37	-62.807,21	Hampir dari cukup
Industri Pengolahan	0,77	-333.813,80	220.227,71	Kurang
Pengadaan Listrik dan Gas	0,99	-350,73	497,96	Kurang
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Limbah	0,89	-3.124,03	228,47	Kurang
Konstruksi	0,77	-76.584,31	-31.927,43	Kurang sekali
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	1,03	-279.156,91	31.369,01	Baik
Transportasi dan Pergudangan	0,93	50.675,35	12.064,50	Cukup
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,15	-6.602,59	33.335,85	Baik
Informasi dan Komunikasi	0,62	71.634,03	57.257,24	Cukup
Jas Keuangan dan Asuransi	0,91	-2.859,62	-23.770,38	Kurang sekali
Real Estate	0,62	8.982,30	-6.985,64	Hampir dari cukup
Jasa Perusahaan	0,64	6.734,16	-649,84	Hampir dari cukup
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,27	-134.885,14	19.494,08	Baik
Jasa Pendidikan	1,09	75.050,29	12.054,95	Istimewa
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,17	19.581,63	-1.445,75	Baik Sekali
Jasa Lainnya	1,21	15.740,84	-10.428,74	Baik sekali

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel analisis tipologi sektoral di atas menjelaskan bahwa

- (1) sektor pertanian , kehutanan dan perikanan memiliki nilai perhitungan tipologi baik,
- (2) sektor pertambangan dan penggalian hamper dari cukup,
- (3)

sektor industri pengolahan kurang, (4) sektor pengadaan listrik dan gas kurang, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah kurang, (6) sektor konstruksi kurang sekali, (7) sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor baik, (8) sektor transportasi dan pergudangan cukup, (9) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum baik, (10) sektor informasi dan komunikasi cukup, (11) sektor jasa keuangan dan asuransi kurang sekali, (12) sektor real estate hampir dari cukup (13) sektor jasa perusahaan hampir dari cukup, (14) sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib baik, (15) sektor jasa pendidikan istimewa, (16) sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial baik sekali, (17) jasa lainnya baik sekali. Untuk memperjelas hasil interpretasi sektor pertanian, maka akan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 16. Analisis Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan

No	Aspek	Parameter	Makna
1	LQ	>1	Sektor potensial
2	M	Negatif	Sektor tumbuh lambat
3	C	Positif	Sektor Kompetitif
4	Tipologi	III	Baik

Sumber: Data diolah

Berdasarkan nilai LQ tahun 2012-2016, sektor pertanian kehutanan dan perikanan menunjukkan nilai LQ sebesar 1,79 ($LQ > 1$), hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut adalah sektor potensial. Nilai LQ lebih dari satu

menunjukkan sektor tersebut telah mampu kebutuhan masyarakat daerahnya dan mampu untuk diekspor.

Perhitungan analisis *Shift Share* tahun 2012-2016 untuk sektor pertanian kehutanan dan perikanan, nilai komponen M negatif yaitu sebesar (-1.111.485,93) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor di Kabupaten Pati tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan hasil perhitungan C, sektor pertanian kehutanan dan perikanan adalah sektor yang kompetitif

Berdasarkan perhitungan analisis tipologi sektoral, sektor pertanian kehutanan dan perikanan memiliki nilai $LQ > 1$, M bernilai negatif (< 0), dan C bernilai positif (> 0) termasuk dalam tipologi III sehingga sektor tersebut menunjukkan baik untuk dikembangkan sebagai sektor basis perekonomian di kabupaten Pati. Untuk analisis tipologi sektoral pada sub sektor pertanian kehutanan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 17. Analisis Tipologi Sektoral
Sub Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan**

Sub Sektor Ekonomi	LQ	M	C	Tipologi
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,95	111.582,32	175.816,97	Cukup
Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,39	-11.347,86	6.970,46	Kurang
Perikanan	2,10	83.624,89	98.169,77	Istimewa

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa (1) sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian berada pada tipologi cukup (2) sub sektor kehutanan dan penebangan kayu kurang (3) sub sektor perikanan istimewa. Untuk memperjelas hasil interpretasi, akan dijelaskan lebih rinci pada setiap sub sektor sebagai berikut:

a. Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Tabel 18. Analisis Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

No	Aspek	Parameter	Makna
1	LQ	<1	Bukan sub sektor potensial
2	M	Positif	Sektor tumbuh cepat
3	C	Positif	Sektor Kompetitif
4	Tipologi	V	Cukup

Sumber: Data diolah

Berdasarkan nilai LQ tahun 2012-2016, sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa peternakan menunjukkan nilai LQ sebesar 0,95 ($LQ < 1$), hal ini menunjukkan bahwa sub sektor tersebut adalah bukan sub sektor potensial. Perhitungan analisis *Shift Share* tahun 2012-2016 untuk sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa peternakan, nilai komponen M positif yaitu sebesar 111.582,32 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor di Kabupaten Pati tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan hasil perhitungan C, sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa peternakan adalah sub sektor yang kompetitif.

Berdasarkan perhitungan analisis tipologi sektoral, sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa peternakan memiliki nilai $LQ < 1$, M bernilai positif (> 0), dan C bernilai positif (> 0) termasuk dalam tipologi V sehingga sub sektor tersebut menunjukkan cukup untuk dikembangkan sebagai sub sektor basis perekonomian di kabupaten Pati.

b. Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu

Tabel 19. Analisis Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu

No	Aspek	Parameter	Makna
1	LQ	< 1	Bukan sub sektor potensial
2	M	Negatif	Sektor tumbuh lambat
3	C	Positif	Sektor Kompetitif
4	Tipologi	VII	Kurang

Sumber: Data diolah

Berdasarkan nilai LQ tahun 2012-2016, sub sektor kehutanan dan penebangan kayu menunjukkan nilai LQ sebesar 0,39 ($LQ < 1$), hal ini menunjukkan bahwa sub sektor tersebut adalah bukan sub sektor potensial. Perhitungan analisis *Shift Share* tahun 2012-2016 sub sektor kehutanan dan penebangan kayu, nilai komponen M negatif yaitu sebesar -11.347,86 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan sub sektor di Kabupaten Pati tumbuh lebih lambat dibandingkan sub sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan hasil perhitungan C, sub sektor kehutanan dan penebangan kayu adalah sektor yang kompetitif. Berdasarkan perhitungan

analisis tipologi sektoral, sub sektor kehutanan dan penebangan kayu memiliki nilai $LQ < 1$, M bernilai positif (< 0), dan C bernilai positif (> 0) termasuk dalam tipologi VII sehingga sub sektor tersebut menunjukkan kurang untuk dikembangkan sebagai sub sektor basis perekonomian di kabupaten Pati.

c. Sub Sektor Perikanan

Tabel 20. Analisis Sub Sektor perikanan

No	Aspek	Parameter	Makna
1	LQ	> 1	Sub sektor potensial
2	M	Positif	Sektor tumbuh cepat
3	C	Positif	Sektor Kompetitif
4	Tipologi	I	Istimewa

Sumber: Data diolah

Berdasarkan nilai LQ tahun 2012-2016, sub sektor perikanan menunjukkan nilai LQ sebesar 2,10 ($LQ > 1$), hal ini menunjukkan bahwa sub sektor tersebut adalah sub sektor potensial. Perhitungan analisis *Shift Share* tahun 2012-2016 untuk sub sektor perikanan, nilai komponen M positif yaitu sebesar 83.624,89 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan sub sektor di Kabupaten Pati tumbuh lebih cepat dibandingkan sub sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan hasil perhitungan C, sub sektor perikanan adalah sub sektor yang kompetitif. Berdasarkan perhitungan analisis tipologi sektoral, sub sektor perikanan memiliki nilai $LQ > 1$, M bernilai positif

(>0), dan C bernilai positif (>0) termasuk dalam tipologi I sehingga sektor tersebut menunjukkan istimewa untuk dikembangkan sebagai sektor basis perekonomian di kabupaten Pati.

4. Peran Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Produktifitas Pertanian Kabupaten Pati

Kabupaten Pati yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah, perekonomiannya didukung oleh tujuh belas sektor. Masing-masing sektor memberikan jumlah produktifitas yang berbeda. Sesuai fokus kedua dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan sektor pertanian dalam meningkatkan produktifitas pertanian Kabupaten Pati, maka akan dibahas lebih lanjut dan rinci. Berdasarkan perhitungan *Location Quotient* (LQ) bahwa sektor pertanian merupakan sektor basis di Kabupaten Pati. Adapun hasil perhitungan LQ dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Nilai Location Quotient Tahun 2012-2016

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,75	1,78	1,78	1,81	1,84	1,79
2	Pertambangan dan Penggalian	0,90	0,91	0,91	0,90	0,79	0,88
3	Industri Pengolahan	0,75	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,97	0,97	1,00	1,01	0,99	0,99
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Limbah	0,89	0,87	0,89	0,89	0,90	0,89
6	Konstruksi	0,77	0,78	0,78	0,77	0,76	0,77

7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	1,03	1,02	1,04	1,04	1,04	1,03
8	Transportasi dan Pergudangan	0,92	0,93	0,93	0,93	0,94	0,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,13	1,14	1,14	1,15	1,17	1,15
10	Informasi dan Komunikasi	0,59	0,60	0,64	0,64	0,64	0,62
11	Jas Keuangan dan Asuransi	0,92	0,93	0,92	0,91	0,89	0,91
12	Real Estate	0,63	0,62	0,62	0,61	0,61	0,62
13	Jasa Perusahaan	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,26	1,26	1,27	1,27	1,29	1,27
15	Jasa Pendidikan	1,08	1,09	1,10	1,10	1,10	1,09
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,17	1,17	1,17	1,18	1,17	1,17
17	Jasa Lainnya	1,23	1,21	1,21	1,22	1,20	1,21

Sumber: Data Diolah

Pada tabel perhitungan nilai LQ di atas dapat diketahui bahwa sektor pertanian memperoleh skor LQ tertinggi dengan nilai 1,79. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Pati memiliki peran relatif lebih besar, dengan kata lain produk di sektor pertanian mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal dan mengekspor ke luar daerah. Sektor pertanian di Kabupaten Pati selama tahun 2012 hingga tahun 2016 selalu mengalami kenaikan.

Sektor pertanian sebagai sektor basis didukung dengan kondisi geografis Kabupaten Pati yang sangat baik dan memungkinkan untuk melakukan berbagai macam aktifitas pertanian. Kabupaten Pati dapat dikelompokkan menjadi empat daerah besar yaitu daerah dataran pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah pegunungan. Dengan kondisi dataran yang

beragam, Kabupaten Pati juga memiliki jenis tanaman yang beragam, dimana setiap jenis tanah memiliki kriteria tanaman tersendiri sehingga Kabupaten memiliki jenis produk pertanian yang beragam. Dengan jenis tanaman pertanian yang beragam, jumlah lahan pertanian juga besar. Adapun luas penggunaan lahan di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Penggunaan Lahan di Kabupaten Pati

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Lahan Sawah	59.270
	a. Irigasi	36.563
	b. Tadah hujan	22.717
	c. Pasang surut	0
	d. Rawa lebak	19
2	Lahan Bukan Sawah	60.314
	a. Tegall	31.096
	b. Ladang	1.363
	c. Perkebunan	2.313
	d. Hutan rakyat	436
	e. Padang rumput	0
	f. Sementara tidak diusahakan	9.741
	g. Lainnya	15.365
3	Lahan Bukan pertanian (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai,dll)	30.755

Sumber: Kabupaten Pati Dalam Angka 2017

Berdasarkan tabel penggunaan lahan di atas dapat diketahui bahwa total penggunaan lahan sawah di Kabupaten Pati sebesar 59.270 Hektar. Jumlah penggunaan lahan sawah lebih besar dibandingkan penggunaan lahan bukan pertanian. Hal inilah yang menjadi salah satu pendukung sektor pertanian

sebagai sektor basis di kabupaten Pati. Penggunaan lahan paling besar adalah lahan bukan sawah sebesar 60.314 Hektar.

Peranan sektor pertanian dalam meningkatkan produktifitas pertanian Kabupaten Pati dapat dilihat dari peran lapangan usaha pertanian terhadap PDRB Kabupaten Pati pada tabel berikut:

Tabel 23. Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan 2012-2016 (%)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	85,20	84,55	83,36	83,89	83,51
a. Tanaman Pangan	45,94	44,86	41,29	42,63	42,18
b. Tanaman Holtikultura	16,37	16,33	17,61	17,42	17,35
c. Tanaman Perkebunan	12,04	11,66	12,28	12,12	12,12
d. Peternakan	8,98	9,46	10,16	9,82	9,97
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	1,87	1,96	2,01	1,91	1,89
Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,45	1,45	1,56	1,44	1,36
Perikanan	13,35	14,10	15,56	14,67	15,13

Sumber: PDRB Kabupaten Pati 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian memberikan peranan terbesar dengan nilai presentase peranan lapangan usaha 83,51% terhadap PDRB pada tahun 2016. Presentase pada tahun 2016 lebih kecil dibandingkan presentase tahun 2012 dengan nilai presentase 85,20. Meskipun memiliki presentase terbesar, lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian relatif mengalami penurunan presentase tiap tahunnya.

Lapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu menyumbang 1,36% pada tahun 2016. Presentase tersebut lebih kecil dibandingkan pada tahun 2012

sebesar 1,45%. Lapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu relatif mengalami penurunan dalam kurun 5 tahun terakhir, meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 1,56%.

Lapangan usaha perikanan relatif mengalami kenaikan presentase tiap tahunnya. Pada tahun 2012 sebesar 13,35% dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 15,13%. Untuk mengetahui lebih jelas peranan tiap lapangan usaha akan dijelaskan secara rinci tiap sub sektor.

a. Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Tabel 24. Analisis Tipologi Sektoral Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

No	Aspek	Parameter	Makna
1	LQ	<1	Bukan sub sektor potensial
2	M	Positif	Sektor tumbuh cepat
3	C	Positif	Sektor Kompetitif
4	Tipologi	V	Cukup

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel analisis tipologi sektoral di atas, dapat diketahui hasil analisis LQ, Industrial Mix (M), Copetitif Position (C), dan tipologi sektoral. Sub sektor ini bukan sub sektor potensial dibandingkan dua sub sektor lainnya pada perhitungan LQ karena mendapatkan nilai LQ kurang dari satu ($LQ < 1$). Pada aspek industrial mix sub sektor ini tumbuh cepat. Pada spek kompetitif position sub sektor ini merupakan sub sektor yang kompetitif dan cukup untuk dikembangkan menjadi sub sektor basis.

Tabel 25. PDRB ADHK Sub Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan 2012-2016

No	Sub Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanain	4.824.086	4.986.432	4.858.427	5.247.177	5.441.854
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	85.954	86.757	89.766	88.687	87.463
3	Perikanan	767.960	829.258	885.549	945.323	1.002.347
PDRB PERTANIAN		5.678.000	5.902.448	5.833.742	6.281.187	6.531.664

Sumber: PDRB Kabupaten Pati 2012-2016 – diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian menyumbang PDRB Sektor pertanian tertinggi. Pada tahun 2016 PDRB sub sektor ini sebesar 5.441.854 (juta rupiah), mengalami peningkatan dari tahun 2012 4.824.086 (juta rupiah).

b. Sub Sektor Kehutanan dan penebangan Kayu

Tabel 26. Analisis Tipologi Sektoral Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu

No	Aspek	Parameter	Makna
1	LQ	<1	Bukan sub sektor potensial
2	M	Negatif	Sektor tumbuh lambat
3	C	Positif	Sektor Kompetitif
4	Tipologi	VII	Kurang

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel analisis tipologi sektoral di atas, dapat diketahui hasil analisis LQ, Industrial Mix (M), Copetitif Position (C), dan tipologi sektoral. Sub sektor ini bukan sub sektor potensial dibandingkan dua sub

sektor lainnya pada perhitungan LQ karena mendapatkan nilai LQ kurang dari satu ($LQ < 1$). Pada aspek industrial mix sub sektor ini tumbuh lambat. Pada aspek competitiv position sub sektor ini merupakan sub sektor yang kompetitif dan kurang untuk dikembangkan menjadi sub sektor basis.

Tabel 27. PDRB ADHK Sub Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan 2012-2016

No	Sub Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanain	4.824.086	4.986.432	4.858.427	5.247.177	5.441.854
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	85.954	86.757	89.766	88.687	87.463
3	Perikanan	767.960	829.258	885.549	945.323	1.002.347
PDRB PERTANIAN		5.678.000	5.902.448	5.833.742	6.281.187	6.531.664

Sumber: PDRB Kabupaten Pati 2012-2016 – diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB sub sektor kehutanan dan penebangan kayu menyumbang PDRB Sektor pertanian terendah. Pada tahun 2016 PDRB sub sektor ini sebesar 87.463 (juta rupiah), mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 85.954 (juta rupiah). Sub sektor ini mengalami kenaikan PDRB pada tahun 2013 sebesar 86.757 (juta rupiah) dan tahun 2014 sebesar 89.766 (juta rupiah) kemudian mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya.

c. Sub Sektor Perikanan

Tabel 28. Analisis Sub Sektor perikanan

No	Aspek	Parameter	Makna
1	LQ	>1	Sub sektor potensial
2	M	Positif	Sektor tumbuh cepat
3	C	Positif	Sektor Kompetitif
4	Tipologi	I	Istimewa

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel analisis tipologi sektoral di atas, dapat diketahui hasil analisis LQ, Industrial Mix (M), Copetitif Position (C), dan tipologi sektoral. Sub sektor ini merupakan sub sektor potensial dibandingkan dua sub sektor lainnya pada perhitungan LQ karena mendapatkan nilai LQ lebih dari satu ($LQ > 1$). Pada aspek industrial mix sub sektor ini tumbuh cepat. Pada aspek kompetitif position sub sektor ini merupakan sub sektor yang kompetitif dan pada penilaian tipologi sektoral memperoleh predikat istimewa. Artinya sub sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan agar bisa meningkatkan PDRB Pertanian mengingat di Kabupaten Pati memiliki dataran pantai yang menghadap laut jawa yang dikenal memiliki persediaan ikan dan produk laut melimpah.

Tabel 29. PDRB ADHK Sub Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan 2012-2016

No	Sub Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanain	4.824.086	4.986.432	4.858.427	5.247.177	5.441.854
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	85.954	86.757	89.766	88.687	87.463

3	Perikanan	767.960	829.258	885.549	945.323	1.002.347
	PDRB PERTANIAN	5.678.000	5.902.448	5.833.742	6.281.187	6.531.664

Sumber: PDRB Kabupaten Pati 2012-2016 – diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB sub sektor perikanan menyumbang PDRB Sektor pertanian sebesar 767.960 (juta rupiah). PDRB sub sektor perikanan relatif meningkat sejak tahun 2012 hingga tahun 2016. PDRB pada tahun 2016 sebesar 1.002.347 (juta rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pati tahun 2012-2016 dengan menggunakan metode LQ, *Shift Share* dan tipologi sektoral, maka sektor yang berpotensi menjadi sektor basis di Kabupaten Pati adalah sektor pertanian, kehutanan, dan penebangan kayu. Sektor tersebut memperoleh nilai LQ lebih dari satu ($LQ > 1$) yang artinya sektor tersebut merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan dan mampu untuk diekspor keluar daerah. Pada analisis *shift share* sektor ini tumbuh lambat ($M < 0$) meskipun merupakan sektor yang kompetitif ($C > 0$). Sedangkan dalam analisis tipologi sektoral masuk ke dalam tipologi III yang artinya sektor ini baik untuk dikembangkan menjadi sektor basis perekonomian.
2. Sub sektor perikanan menjadi sub sektor potensial untuk dikembangkan ($LQ > 1$). Sub sektor perikanan memiliki pertumbuhan yang cepat ($M > 0$) dan merupakan sub sektor yang kompetitif ($C > 0$) serta memperoleh tipologi istimewa.

3. Sektor pertanian memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan Produktifitas Pertanian Kabupaten Pati. Sub Sektor Pertanian Peternakan Perburuan dan jasa lainnya memiliki peran 83,51% dalam meningkatkan produktifitas sektor pertanian. Sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu memiliki peranan 1,36% serta sub sektor perikanan memiliki peran 15,13% dalam peningkatan produktifitas pertanian Kabupaten Pati.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Jaminan oleh pemerintah terhadap ketersediaan dan kemudahan mendapatkan bahan-bahan pertanian dan perikanan serta alat-alat produksi, mengingat sektor pertanian merupakan sektor basis sebagai tumpuan pembangunan wilayah Kabupaten Pati
2. Membuka pasar dan mempermudah akses ekspor hasil pertanian ke luar daerah dan ke luar negeri.
3. Sub sektor perikanan harus menjadi konsentrasi pengembangan sub sektor basis karena sub sektor perikanan memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan PDRB pertanian khususnya dan PDRB Kabupaten Pati. Selain itu pemerintah juga harus mengelola dan menyediakan tempat pelelangan dan pengolahan ikan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta : Bina Aksara.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. 2015. *Data Strategis Kabupaten Pati Tahun 2015*. Pati : IPDS BPS Pati.
- _____. 2015. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pati 2011-2015*. Pati : IPDS BPS Pati.
- _____. 2016. *Kabupaten Pati Dalam Angka 2016*. Pati : IPDS BPS Pati.
- _____. 2016. *Statistik Daerah Kabupaten Pati 2016*. Pati : IPDS BPS Pati
- _____. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kabupaten Pati*. Pati : IPDS BPS Pati.
- _____. 2017. *Analisis Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati 2011-2015*. Pati : IPDS BPS Pati.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. *Indikator Utama Pertanian Jawa Tengah 2015*.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati. 2017. *Rencana Strategis (RENSTRA)*.
- Dwi, Eka Nurjayanti. *Identifikasi Sektor Pertanian dalam Penentuan Sektor Unggulan di Kabupaten Pati*. Semarang : Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Fatah, Luthfi. 2006. *Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Banjarbaru : Universitas Lambung Mangkurat dengan Pustaka Banua.
- Hanani, dkk. 2003. *Strategi Pembangunan Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Kabupaten Temanggung*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif)*. Jakarta : Erlangga.

- Kartasapoetra. 1988. *Pengantar Ekonomi Produksi Pertanian*. Jakarta : Bima Aksara
- Kartasapoetra, dkk. 1988. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Bina Aksara
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Erlangga.
- Lusminah. 2008. *Analisis Potensi Wilayah Kecamatan Berbasis komoditas Pertanian dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Cilacap*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Third Edition. United State : SAGE Publications.
- Nurjayanti, Eka Dwi. 2012. *Kontribusi Sektor Pertanian dalam Perekonomian Wilayah Kabupaten Pati*. Universitas Wahid Hasyim : Jurnal Ilmu Pertanian.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Poli. 1992. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
- Rakhmatullah, Mukhammad Iqbal. 2015. *Analisis Potensi Wilayah Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah*. Univeritas Brawijaya. Malang.
- Reinjtjes, dkk. 1999. *Pertanian Masa Depan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
- Sa'adah, Nurus. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Siagian, P. Sondang. 1988. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta : Haji Masagung.
- Sofiyanto. 2015. *Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Batang*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Surjadi. 2002. *Paradigma Pembangunan dan Kapabilitas Aparatur*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 2002.
- Suryono, Agus. 2006. *Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Malang : Universitas Negeri Malang.
- Syarifudin Arif. *Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dalam Upaya Peningkatan PDRB Kabupaten Pati*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Theresia, Aprillia. Andini, Krisna S. Nugraha, Prima G.P. Mardikanto, Totok. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi public Kontenporer*. Jakarta : Kencana.
- Thohir, Shofyan. 2013. *Analisis Sektor Pertanian dalam Struktur Perekonomian di Kabupaten Kulon Progo*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1983. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1984. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. Gunung Agung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES
- Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Warsani, Henki. 2013. *Kajian Pemanfaatan Sawah di Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi*. Diakses 20 November 2016 dari repository.upi.edu
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

LAMPIRAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
<http://fia.ub.ac.id> E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 581/UN10.3/AK/2017
Lampiran : -
Perihal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)
Kabupaten Pati

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Sigid Wilya Wiratmaja
Alamat : Jl. Kertosentono 133, Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
NIM : 125030600111007
Jurusan : Administrasi Publik
Minat : Perencanaan Pembangunan
Tema : **Analisis Potensi Wilayah Berbasis Komoditas Pertanian dalam Meningkatkan Produktifitas Pertanian Kabupaten Pati**

Lamanya : 1 (satu) bulan (18 Januari 2017 - 17 Februari 2017)
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 11 Januari 2017

a.n. Dekan
Kantor Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001

- Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UB
 2. BAPPEDA Kabupaten Pati
 3. Dinas Pertanian Kabupaten Pati
 4. Arsip

PDRB Kabupaten Pati Atas Dasar Harga Konstan

Tahun 2012-2016 (juta rupiah)

LAPANGAN USAHA		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.678.000	5.902.448	5.833.742	6.281.187	6.531.664
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	4.824.086	4.986.432	4.858.427	5.247.177	5.441.854
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	85.954	86.757	89.766	88.687	87.463
3	Perikanan	767.960	829.258	885.549	945.323	1.002.347
B	Pertambangan dan Penggalian	378.085	405.306	430.795	441.033	461.019
C	Industri Pengolahan	5.520.584	5.984.883	6.380.180	6.680.746	6.991.047
D	Pengadaan Listrik dan Gas	22.161	24.153	26.456	27.326	28.667
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah	14.859	14.641	15.356	15.627	16.227
F	Konstruksi	1.647.919	1.739.010	1.813.757	1.908.072	2.012.253
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.178.820	3.287.462	3.500.934	3.658.738	3.843.147
H	Transportasi dan Pergudangan	586.053	642.674	706.541	761.832	816.952
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	719.005	760.935	817.587	879.849	952.046
J	Informasi dan Komunikasi	445.748	486.915	583.470	640.887	702.540
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	521.219	546.758	566.832	601.845	644.145
L	Real Estate	227.767	242.821	258.938	276.716	295.118
M,N	Jasa Perusahaan	40.583	45.427	49.160	53.248	58.312
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	785.387	805.316	817.152	858.767	895.351
P	Jasa Pendidikan	751.901	825.903	913.564	983.636	1.054.753
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177.504	190.039	210.411	226.276	246.572
R,S,T,U	Jasa Lainnya	376.733	404.865	440.338	456.541	490.143
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		21.072.329	22.329.694	23.365.214	24.752.325	26.039.955

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2012-2016 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	106.536.703,12	108.832.110,55	107.793.380,89	113.826.299,04	116.250.931,53
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	95.601.895,16	97.413.889,93	96.286.410,28	102.150.557,53	104.360.311,98
a. Tanaman Pangan	40.079.215,64	40.318.220,93	36.456.570,07	40.129.076,06	40.551.014,63
b. Tanaman Hortikultura Semusim	8.488.979,83	8.481.598,14	8.836.926,36	9.055.392,35	9.262.227,95
c. Perkebunan Semusim	2.129.222,95	2.243.416,54	2.387.858,14	2.515.786,18	2.492.731,92
d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	17.682.994,46	17.690.632,39	18.441.843,15	18.918.211,56	19.144.011,82
e. Perkebunan Tahunan	7.876.260,69	8.172.970,71	8.599.343,07	8.915.107,33	9.195.702,77
f. Peternakan	17.286.984,73	18.248.180,42	19.263.474,44	20.215.645,34	21.292.537,74
g. Jasa Pertanian dan Perburuan	2.058.236,86	2.258.870,80	2.300.395,05	2.401.338,71	2.422.085,15
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	4.083.413,65	4.093.448,74	4.073.354,75	3.997.568,24	3.823.956,28
3 Perikanan	6.851.394,31	7.324.771,88	7.433.615,86	7.678.173,27	8.066.663,27
B Pertambangan dan Penggalian	13.745.874,30	14.594.164,05	15.566.648,84	16.040.765,67	19.044.524,87
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	1.380.057,38	1.484.852,39	1.573.946,70	1.770.652,72	4.165.414,64
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pertambangan Bijih Logam	4.070,75	529,71	0,00	0,00	0,00
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	12.361.746,17	13.108.781,95	13.992.702,14	14.270.112,95	14.879.110,23
C Industri Pengolahan	241.528.855,93	254.694.118,95	271.526.773,18	284.575.766,45	296.227.398,37
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	46.742.862,25	46.328.182,52	46.840.127,52	49.694.904,74	52.228.922,89
a. Industri Batu Bara	5.393,56	5.414,59	5.478,56	5.677,00	5.141,25
b. Industri Pengilangan Migas	46.737.468,69	46.322.767,93	46.834.648,96	49.689.227,74	52.223.781,64
2 Industri Makanan dan Minuman	71.598.649,25	77.804.254,60	85.508.741,39	93.592.160,21	99.410.330,10
3 Pengolahan Tembakau	53.465.913,33	53.455.965,83	57.831.963,83	58.842.330,07	59.375.454,04
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	19.875.302,35	22.664.525,44	23.809.367,94	23.587.780,02	24.087.132,00
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1.953.677,89	2.147.955,11	2.441.532,44	2.591.674,32	2.731.694,34
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	11.476.317,10	12.703.230,69	13.410.023,53	13.667.336,41	14.865.894,21
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2.285.590,73	2.300.931,55	2.375.258,14	2.478.328,78	2.555.764,52
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	13.876.399,29	15.096.020,58	16.114.714,34	16.785.739,61	17.237.399,97
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3.401.345,31	3.545.669,14	3.679.301,22	3.532.627,81	3.715.955,29
10 Industri Barang Galian bukan Logam	5.006.009,60	5.336.850,02	5.435.643,83	5.484.142,07	5.755.575,68
11 Industri Logam Dasar	2.358.453,87	2.659.392,58	2.941.607,82	2.979.809,81	2.899.142,00
12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	3.698.397,31	4.287.201,37	4.465.415,49	4.343.243,79	3.987.476,36
13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	861.996,31	867.272,56	887.371,33	920.084,33	980.219,27
14 Industri Alat Angkutan	1.575.593,61	1.851.050,18	1.960.801,62	2.035.009,34	2.183.320,71
15 Industri Furnitur	2.401.494,06	2.688.173,43	2.840.019,08	3.043.893,40	3.144.473,79
16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	950.853,67	957.443,35	984.883,66	996.701,74	1.068.643,20
D Pengadaan Listrik dan Gas	751.160,19	813.604,61	866.488,30	887.584,37	954.806,10
1 Ketenagalistrikan	731.759,71	792.177,30	843.813,30	863.364,97	931.986,12
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	19.400,48	21.427,31	22.675,00	24.219,40	22.819,98
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	547.794,91	549.040,44	567.980,08	577.261,68	589.805,23

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
F	Konstruksi	70.034.622,63	73.465.919,37	76.681.876,60	81.286.113,22	86.875.267,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	101.058.608,68	105.825.306,31	110.899.193,58	115.299.085,85	121.181.123,88
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	20.346.483,91	21.901.615,49	22.866.522,32	23.957.622,46	24.942.045,22
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	80.712.124,77	83.923.690,82	88.032.671,26	91.341.463,39	96.239.078,66
H	Transportasi dan Pergudangan	20.818.468,63	22.760.150,97	24.868.280,75	26.807.881,97	28.592.166,82
	1 Angkutan Rel	225.231,54	242.885,09	331.018,70	387.609,80	427.754,47
	2 Angkutan Darat	17.455.143,06	19.018.336,04	20.669.638,16	22.424.155,48	23.916.317,22
	3 Angkutan Laut	1.654.331,35	1.902.884,76	2.111.544,97	2.089.013,95	2.236.355,94
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	66.429,21	65.415,91	69.437,51	72.513,64	81.837,28
	5 Angkutan Udara	791.173,38	851.566,22	933.257,01	988.930,23	1.045.185,10
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	626.160,08	679.062,95	753.384,40	845.658,87	884.716,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20.871.604,64	21.812.570,05	23.471.641,07	25.064.275,14	26.668.736,81
	1 Penyediaan Akomodasi	3.016.721,04	3.316.823,41	3.565.870,46	3.736.468,19	3.925.084,58
	2 Penyediaan Makan Minum	17.854.883,60	18.495.746,64	19.905.770,61	21.327.806,95	22.743.652,23
J	Informasi dan Komunikasi	24.690.219,27	26.663.583,07	30.130.161,63	33.001.271,38	35.742.555,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.588.738,12	19.311.454,80	20.106.851,64	21.719.194,84	23.820.513,19
	1 Jasa Perantara Keuangan	14.811.658,75	15.200.894,85	15.551.579,38	16.557.838,29	17.973.908,47
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	407.658,75	463.039,57	517.385,01	584.924,55	650.929,77
	3 Jasa Keuangan Lainnya	3.368.512,60	3.646.531,25	4.036.793,24	4.575.229,57	5.194.367,11
	4 Jasa Penunjang Keuangan	908,02	989,13	1.094,01	1.202,43	1.307,84
L	Real Estate	11.934.423,12	12.853.218,11	13.776.863,54	14.822.295,08	15.829.477,85
M,N	Jasa Perusahaan	2.087.130,46	2.340.118,40	2.526.615,62	2.741.142,86	3.032.330,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20.373.579,95	20.912.828,39	21.075.646,54	22.194.694,80	22.720.443,65
P	Jasa Pendidikan	22.760.883,69	24.930.587,32	27.266.220,07	29.324.081,90	31.563.635,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.959.375,94	5.312.609,80	5.916.710,61	6.307.617,26	6.929.495,92
R,S,T,U	Jasa lainnya	10.055.072,38	10.983.732,87	11.917.818,01	12.300.030,67	13.360.350,97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		691.343.115,96	726.655.118,06	764.959.150,95	806.775.362,18	849.383.564,59

Perhitungan LQ Sektoral Kabupaten Pati Tahun 2012-2016

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,75	1,78	1,78	1,81	1,84	1,79
2	Pertambangan dan Penggalian	0,90	0,91	0,91	0,90	0,79	0,88
3	Industri Pengolahan	0,75	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,97	0,97	1,00	1,01	0,99	0,99
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Limbah	0,89	0,87	0,89	0,89	0,90	0,89
6	Konstruksi	0,77	0,78	0,78	0,77	0,76	0,77
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	1,03	1,02	1,04	1,04	1,04	1,03
8	Transportasi dan Pergudangan	0,92	0,93	0,93	0,93	0,94	0,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,13	1,14	1,14	1,15	1,17	1,15
10	Informasi dan Komunikasi	0,59	0,60	0,64	0,64	0,64	0,62
11	Jas Keuangan dan Asuransi	0,92	0,93	0,92	0,91	0,89	0,91
12	Real Estate	0,63	0,62	0,62	0,61	0,61	0,62
13	Jasa Perusahaan	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,26	1,26	1,27	1,27	1,29	1,27
15	Jasa Pendidikan	1,08	1,09	1,10	1,10	1,10	1,09
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,17	1,17	1,17	1,18	1,17	1,17
17	Jasa Lainnya	1,23	1,21	1,21	1,22	1,20	1,21

Perhitungan LQ Sub Sektor Pertanian Kabupaten Pati**Tahun 2012-2016**

No	Sub Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,95	0,96	0,95	0,96	0,98	0,96
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,41
3	Perikanan	2,10	2,12	2,24	2,31	2,33	2,22

Pertumbuhan PDRB Sektoral Kabupaten Pati Tahun 2012-2016

No	Sektor	PDRB Kab Pati		ΔPDRB	Pertumbuhan PDRB Sektoral (B-A)/A
		2012	2016		
		A	B	B-A	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.678.000	6.531.664	853.664	0,15035
2	Pertambangan dan Penggalian	378.085	461.019	82.934	0,21935
3	Industri Pengolahan	5.520.584	6.991.047	1.470.463	0,26636
4	Pengadaan Listrik dan Gas	22.161	28.667	6.506	0,29358
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Limbah	14.859	16.227	1.368	0,09207
6	Konstruksi	1.647.919	2.012.253	364.334	0,22109
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	3.178.820	3.843.147	664.327	0,20899
8	Transportasi dan Pergudangan	586.053	816.952	230.899	0,39399
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	719.005	952.046	233.041	0,32412
10	Informasi dan Komunikasi	445.748	702.540	256.792	0,57609
11	Jas Keuangan dan Asuransi	521.219	644.145	122.926	0,23584
12	Real Estate	227.767	295.118	67.351	0,29570
13	Jasa Perusahaan	40.583	58.312	17.729	0,43686
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	785.387	895.351	109.964	0,14001
15	Jasa Pendidikan	751.901	1.054.753	302.852	0,40278
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177.504	246.572	69.068	0,38911
17	Jasa Lainnya	376.733	490.143	113.410	0,30104
Rata-rata					0,29102

Pertumbuhan PDRB Sektoral Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2012-2016

No	Sektor	PDRB JATENG		ΔPDRB	Pertumbuhan PDRB Sektoral
		2012	2016		
		A	B	B-A	(B-A)/A
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	106.536.703,12	116.250.931,53	9.714.228,41	0,09118
2	Pertambangan dan Penggalian	13.745.874,30	19.044.524,87	5.298.650,57	0,38547
3	Industri Pengolahan	241.528.855,93	296.227.398,37	54.698.542,44	0,22647
4	Pengadaan Listrik dan Gas	751.160,19	954.806,10	203.645,91	0,27111
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Limbah	547.794,91	589.805,23	42.010,32	0,07669
6	Konstruksi	70.034.622,63	86.875.267,97	16.840.645,34	0,24046
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	101.058.608,68	121.181.123,88	20.122.515,20	0,19912
8	Transportasi dan Pergudangan	20.818.468,63	28.592.166,82	7.773.698,19	0,37340
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20.871.604,64	26.668.736,81	5.797.132,17	0,27775
10	Informasi dan Komunikasi	24.690.219,27	35.742.555,91	11.052.336,64	0,44764
11	Jas Keuangan dan Asuransi	18.588.738,12	23.820.513,19	5.231.775,07	0,28145
12	Real Estate	11.934.423,12	15.829.477,85	3.895.054,73	0,32637
13	Jasa Perusahaan	2.087.130,46	3.032.330,20	945.199,74	0,45287
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20.373.579,95	22.720.443,65	2.346.863,70	0,11519
15	Jasa Pendidikan	22.760.883,69	31.563.635,32	8.802.751,63	0,38675
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.959.375,94	6.929.495,92	1.970.119,98	0,39725
17	Jasa Lainnya	10.055.072,38	13.360.350,97	3.305.278,59	0,32872
Rata-rata					0,28694

Perhitungan National Share (NS) Sektoral Kabupaten Pati

Tahun 2012-2016

No	Sektor Ekonomi	PDRB PATI 2012	Rata Pertumbuhan PDRB JATENG	National Growth Share (NGS)
		A	B	AxB
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.678.000	0,28694	1629217,26
2	Pertambangan dan Penggalian	378.085	0,28694	108485,84
3	Industri Pengolahan	5.520.584	0,28694	1584049,09
4	Pengadaan Listrik dan Gas	22.161	0,28694	6358,77
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Limbah	14.859	0,28694	4263,57
6	Kontruksi	1.647.919	0,28694	472845,73
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	3.178.820	0,28694	912114,90
8	Transportasi dan Pergudangan	586.053	0,28694	168159,15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	719.005	0,28694	206307,74
10	Informasi dan Komunikasi	445.748	0,28694	127900,73
11	Jas Keuangan dan Asuransi	521.219	0,28694	149556,00
12	Real Estate	227.767	0,28694	65354,34
13	Jasa Perusahaan	40.583	0,28694	11644,69
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	785.387	0,28694	225355,06
15	Jasa Pendidikan	751.901	0,28694	215746,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177.504	0,28694	50932,12
17	Jasa Lainnya	376.733	0,28694	108097,90
Total				6046389,64

Perhitungan Industrial Mix (M) Sektoral Kabupaten Pati

Tahun 2012-2016

No	Sektor Ekonomi	PDRB PATI 2012	Pertumbuhan PDRB Sektoral JATENG	Rata Pertumbuhan PDRB JATENG	Industrial Mix Share (IMS)
		A	B	C	Ax(B-C)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.678.000	0,09118	0,28694	- 1.111.485,93
2	Pertambangan dan Penggalian	378.085	0,38547	0,28694	37.255,37
3	Industri Pengolahan	5.520.584	0,22647	0,28694	-333.813,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	22.161	0,27111	0,28694	-350,73
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Limbah	14.859	0,07669	0,28694	-3.124,03
6	Konstruksi	1.647.919	0,24046	0,28694	-76.584,31
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	3.178.820	0,19912	0,28694	-279.156,91
8	Transportasi dan Pergudangan	586.053	0,37340	0,28694	50.675,35
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	719.005	0,27775	0,28694	-6.602,59
10	Informasi dan Komunikasi	445.748	0,44764	0,28694	71.634,03
11	Jas Keuangan dan Asuransi	521.219	0,28145	0,28694	-2.859,62
12	Real Estate	227.767	0,32637	0,28694	8.982,30
13	Jasa Perusahaan	40.583	0,45287	0,28694	6.734,16
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	785.387	0,11519	0,28694	-134.885,14
15	Jasa Pendidikan	751.901	0,38675	0,28694	75.050,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177.504	0,39725	0,28694	19.581,63
17	Jasa Lainnya	376.733	0,32872	0,28694	15.740,84
Total					- 1.663.209,10

Perhitungan Kompetitif Position (C) Sektoral Kabupaten Pati

Tahun 2012-2016

No	Sektor Ekonomi	PDRB	Pertumbuhan	Pertumbuhan	Competitif Position (C)
		PATI 2012	PDRB Sektoral PATI	PDRB Sektoral	
		A	B	C	Ax(B-C)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.678.000	0,15035	0,09118	335.932,67
2	Pertambangan dan Penggalian	378.085	0,21935	0,38547	-62.807,21
3	Industri Pengolahan	5.520.584	0,26636	0,22647	220.227,71
4	Pengadaan Listrik dan Gas	22.161	0,29358	0,27111	497,96
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Limbah	14.859	0,09207	0,07669	228,47
6	Konstruksi	1.647.919	0,22109	0,24046	-31.927,43
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	3.178.820	0,20899	0,19912	31.369,01
8	Transportasi dan Pergudangan	586.053	0,39399	0,37340	12.064,50
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	719.005	0,32412	0,27775	33.335,85
10	Informasi dan Komunikasi	445.748	0,57609	0,44764	57.257,24
11	Jas Keuangan dan Asuransi	521.219	0,23584	0,28145	-23.770,38
12	Real Estate	227.767	0,29570	0,32637	-6.985,64
13	Jasa Perusahaan	40.583	0,43686	0,45287	-649,84
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	785.387	0,14001	0,11519	19.494,08
15	Jasa Pendidikan	751.901	0,40278	0,38675	12.054,95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177.504	0,38911	0,39725	-1.445,75
17	Jasa Lainnya	376.733	0,30104	0,32872	-10.428,74
Total					584.447,46

Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian

Kabupaten Pati Tahun 2012-2016

No	Sub Sektor	PDRB Kab Pati		ΔPDRB	Pertumbuhan PDRB Sektoral
		2012	2016		
		A	B	B-A	(B-A)/A
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanain	4.824.086	5.441.854	617.768	0,12806
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	85.954	87.463	1.509	0,01756
3	Perikanan	767.960	1.002.347	234.387	0,30521
Rata-rata					0,15027

Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016

No	Sub Sektor	PDRB JATENG		ΔPDRB	Pertumbuhan PDRB Sektoral
		2012	2016		
		A	B	B-A	(B-A)/A
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanain	95.601.895,16	104.360.311,98	8.758.417	0,09161
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	4.083.413,65	3.823.956,28	-259.457	-0,06354
3	Perikanan	6.851.394,31	8.066.663,27	1.215.269	0,17738
Rata-rata					0,06848

Perhitungan National Share Sub Sektor Pertanian

Kabupaten Pati Tahun 2012-2016

No	Sub Sektor Ekonomi	PDRB PATI 2012	Rata Pertumbuhan PDRB JATENG	National Growth Share (NGS)
		A	B	AxB
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanain	4.824.086	0,15027	724935,15
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	85.954	0,15027	12916,66
3	Perikanan	767.960	0,15027	115404,49
Total				853256,30

Perhitungan Industrial Mix (M) Sub Sektor Pertanian

Kabupaten Pati Tahun 2012-2016

No	Sub Sektor Ekonomi	PDRB PATI 2012	Pertumbuhan PDRB Sub Sektoral JATENG	Rata Pertumbuhan PDRB JATENG	Industrial Mix Share (IMS)
		A	B	C	Ax(B-C)
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	4.824.086	0,09161	0,06848	111.582,32
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	85.954	-0,06354	0,06848	-11.347,86
3	Perikanan	767.960	0,17738	0,06848	83.624,89
Total					183.859,35

Perhitungan Kompetitif Position (C) Sub Sektor Pertanian

Kabupaten Pati Tahun 2012-2016

No	Sub Sektor Ekonomi	PDRB PATI 2012	Pertumbuhan PDRB Sub Sektoral PATI	Pertumbuhan PDRB Sub Sektoral	Competitif Position (C)
		A	B	C	Ax(B-C)
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	4.824.086	0,12806	0,09161	175.816,97
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	85.954	0,01756	-0,06354	6.970,46
3	Perikanan	767.960	0,30521	0,17738	98.169,77
Total					280.957,20



Dokumentasi Penelitian di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati



Dokumentasi Penelitian di Bappeda Kabupaten Pati



Dokumentasi Apel Pagi di Bappeda Kabupaten Pati



Dokumentasi Pengambilan Data di Dinas Pertanian Kabupaten Pati



Dokumentasi Rapat Dinas Pertanian Kabupaten Pati